

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Anatomi Program CSR: Korporasi 'Memberdayakan' Desa

Sub-bab ini menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Juwiring yang dilaksanakan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Tirta Investama dengan pendampingan Yayasan Gita Pertiwi. Pembahasan difokuskan pada dua kerangka teoretis utama: pertama, dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Zimmerman (2000) yang meliputi partisipasi, pengembangan kapasitas, dan mobilisasi sosial; kedua, dimensi *Corporate Social Responsibility* menurut Carroll (2016) yang mencakup aspek ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Analisis akan menguraikan bagaimana setiap dimensi teoretis tersebut termanifestasi dalam implementasi program CSR di Desa Juwiring, dengan menggunakan indikator-indikator spesifik yang relevan untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Program CSR di Desa Juwiring dimulai pada tahun 2019-2020 sebagai bagian integral dari program payung *Integrated Water Resource Management* (IWRM) di sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) Pusur. Sebagaimana dijelaskan oleh Rama:

"Program ini diimplementasikan di sub DAS Pusur... ada daerah hulu atau *upstream* ada wilayah tengah atau *middlestream* dan wilayah hilir atau *downstream*, dimana Aqua beroperasi dan ada hilirnya di Juwiring. Tiga stream ini itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan interdependensi." (Rama, Manager CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025).

3.1.1. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

a. Dimensi Partisipasi

Dimensi partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat termanifestasi melalui indikator keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Program CSR di Desa Juwiring mengimplementasikan mekanisme partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kepala Desa Juwiring menjelaskan proses pengambilan keputusan:

"Keputusan yang akan dikerjakan datangnya dari musyawarah terlebih dahulu. Jadi saat musyawarah ternyata yang perlu dikerjakan ini dahulu... Dari pihak mereka itu bertanya apa yang dibutuhkan desa ini? Hambatan desa apa? Hambatan ini nantinya akan dibantu oleh CSR." (Sugiarta, Kepala Desa Juwiring, wawancara, 15 April 2025)

Partisipasi juga tercermin dalam struktur pengambilan keputusan di tingkat kelompok tani. Ketua Kelompok Tani menguraikan mekanisme demokratis:

"Untuk pengambilan keputusan, biasanya kami bermusyawarah terlebih dahulu di pertemuan *selapanan*. Misalnya akan ada program dari Gita Pertiwi, kami membahas bersama-sama terlebih dahulu... Saya menyampaikan programnya apa, manfaatnya apa, kemudian anggota yang memberikan masukan." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

b. Dimensi Pengembangan Kapasitas

Dimensi pengembangan kapasitas direalisasikan melalui indikator peningkatan kapasitas dan keterampilan. Program CSR berhasil mentransformasi pengetahuan dan kemampuan teknis

petani dalam praktik pertanian berkelanjutan. Ketua Kelompok Tani mengungkapkan:

"Inovasi yang banyak dirasakan adalah tentang pupuk organik dan pestisida nabati. Sekarang petani banyak yang bisa membuat sendiri. Dahulu menggunakan bahan kimia semua, sekarang sudah campuran, bahkan ada yang sudah lepas dari bahan kimia dan menggunakan bahan nabati semua." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Indikator akses terhadap sumber daya tercapai melalui perbaikan infrastruktur irigasi dan pengelolaan air. Kepala Desa Juwiring mendeskripsikan intervensi infrastrukural:

"Akhirnya didata oleh pemerintah desa dan kelompok tani... setelah didata ternyata ada talud pintu air yang rusak dan beberapa tahun tidak diganti. Sehingga kemarin dari Gita Pertiwi kami mengganti salurannya dan setiap minggu ada gotong royong saluran air." (Sugiarta, Kepala Desa Juwiring, wawancara, 15 April 2025)

c. Dimensi Mobilisasi Sosial

Dimensi mobilisasi sosial terealisasi melalui indikator penguatan organisasi lokal. Program CSR berhasil merevitalisasi Kelompok Wanita Tani yang sebelumnya mengalami stagnasi. Ketua Kelompok Wanita Tani mengisahkan transformasi organisasi:

"Sebelum itu kami sudah ada. Mau mati, ibaratnya mati enggan, hidup tak mau... Tetapi *alhamdulillah* pada waktu sebelum Covid, Gita Pertiwi masuk ke sini, Mas. Akhirnya kami mendapat bimbingan dari Gita Pertiwi... akhirnya sampai sekarang Kelompok Tani Wanita tetap hidup." (Sri Sugiarti, Ketua Kelompok Wanita Tani, wawancara, 21 April 2025)

Indikator jaringan sosial termanifestasi dalam ekspansi konektivitas dan hubungan sosial. Petani Penerima Manfaat menyatakan: "*Kulo ngraosaken hubungan kalih tanggi tepo luwih rumaket. Soale sering gotong royong bareng, tukar pikiran. Terus nggih, anak putu kulo dadi tertarik melu kegiatan tani malih.*" (Wati, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

3.1.2. Dimensi Corporate Social Responsibility

a. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi CSR terealisasi melalui indikator profitabilitas bisnis yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Program ini menciptakan efisiensi biaya produksi pertanian dan diversifikasi sumber pendapatan. Petani Penerima Manfaat mengungkapkan dampak ekonomi langsung:

"Manfaate nggih kathah mas. Riyin kulo tumbas pupuk kimia setiap musim tanam, sakniki kulo sampun saged damel pupuk piyambak. Dados irit sanget, saged nyisihke arto kangge kebutuhan sanes." (Wati, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

Dampak ekonomi jangka panjang tercermin dalam pengembangan produk organik dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Petani Penerima Manfaat menyatakan: "*Kulo malah sampun mulai sadean sayur organik mas, hasile saking pekarangan. Lumayan, seminggu saged angsal yotro sekitar satus ewu.*" (Lastri, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

b. Dimensi Hukum

Dimensi hukum CSR termanifestasi melalui indikator kepatuhan hukum terhadap regulasi nasional tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Manager CSR PT Tirta Investama Klaten menjelaskan kerangka regulasi: "Ada regulasi yang khusus mengatur tentang sosial dan lingkungan sebagai elaborasi dari visi misi kita yang menjadi dual komitmen, yang dikeluarkan oleh SK pabrik." (Manager CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025). Program ini juga mengacu pada regulasi nasional sebagaimana dinyatakan: "Secara nasional kita terpadu ya dalam pengelolaan jadi inline dengan achievement yang akan dicapai oleh pusat." (Rama, Manager CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

c. Dimensi Etika

Dimensi etika CSR direalisasikan melalui indikator standar etika dan moral dalam promosi praktik pertanian berkelanjutan. Transformasi dari sistem pertanian konvensional ke organik mencerminkan komitmen terhadap etika lingkungan. Petani Penerima Manfaat mengungkapkan perubahan paradigma:

"Perubahane kathah mas. Riyin niku sembarang ngangge obat kimia, sakniki kulo sampun ngertos bilih niku saged bahayani bumi. Sakniki kulo luwih ngati-ati." (Suripah, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

Komitmen etika lingkungan juga tercermin dalam pendekatan holistik pengelolaan ekosistem. Staf Yayasan Gita

Pertiwi menjelaskan: "Ketika kita menggunakan pupuk organik pun itu juga akan mempengaruhi kesuburan tanah itu sendiri. Karena itu juga berdampak ke lingkungan." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

d. Dimensi Filantropi

Dimensi filantropi terealisasi melalui indikator kontribusi sukarela yang melampaui kewajiban hukum. Program ini tidak memberikan bantuan *charity* berupa dana atau barang, melainkan investasi jangka panjang dalam pengembangan kapasitas. Manager CSR PT Tirta Investama Klaten menjelaskan model implementasi:

"Ada dua tipe, jadi karena kita bukan sebagai implementation agent kita sebagai supporting sistem, Aqua sebagai financing... Namun day to daynya untuk mendampingi dan memfasilitasi mereka kita bermitra dengan LSM yang disebut di sana Gita Pertiwi." (Rama, Manager CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

Indikator program pengembangan masyarakat termanifestasi dalam strategi penciptaan *local champion* yang berkelanjutan. Manager CSR PT Tirta Investama Klaten menjelaskan strategi sustainabilitas: "Di wilayah hilir yang dilakukan oleh proyek itu menciptakan *local hero* yang menjadi *community organizer* lokal atau fasilitator lokal nantinya. Jadi kalau proyek selesai, ketika kami *exit*, mereka akan meneruskan." (Rama, Manager CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

Efektivitas strategi ini terdokumentasi dalam kemampuan replikasi pengetahuan. Ketua Kelompok Tani mengungkapkan: "Saya sering diundang jadi narasumber di tempat lain, jadi ilmunya bisa menyebar. Regenerasi juga penting, makanya saya dorong yang muda-muda buat aktif." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Program pemberdayaan masyarakat melalui CSR di Desa Juwiring berhasil mengintegrasikan seluruh dimensi pemberdayaan masyarakat Zimmerman (2000) dengan dimensi CSR Carroll (2016). Implementasi program menunjukkan pencapaian indikator-indikator spesifik dalam setiap dimensi teoretis, mengindikasikan transformasi paradigmatis CSR dari *charity model* menuju *sustainable development model* yang menciptakan *shared value* antara korporasi dan komunitas lokal.

3.2. Arena Kontestasi: CSR Mereproduksi Kekuasaan di Desa

Sub-bab ini menganalisis bagaimana program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Tirta Investama di Desa Juwiring menjadi medium strukturisasi kekuasaan yang kompleks dan multidimensional. Analisis dalam sub-bab ini diorganisasikan ke dalam tiga dimensi utama yang saling berkaitan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam implementasi program CSR.

Eksplorasi konsep dualitas struktur Giddens dalam konteks program CSR, di mana struktur kekuasaan yang ada membentuk pelaksanaan program sekaligus ditransformasi oleh program dibahas pada

3.1.1 Dualitas Struktur dalam Implementasi CSR. Pembahasan mencakup tiga aspek kritis: pertama, dinamika aturan formal dan informal yang mengatur implementasi program; kedua, transformasi mekanisme pengambilan keputusan dari pola hierarkis menuju model yang lebih partisipatif; dan ketiga, pembentukan struktur otorisasi baru melalui lembaga-lembaga yang muncul dari program CSR.

Analisis jaringan relasi yang kompleks antara berbagai aktor yang terlibat dalam program CSR dan bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara mereka dibahas pada 3.1.2 Interelasi Aktor dan Distribusi Kekuasaan. Analisis mencakup pola hubungan segitiga antara PT Tirta Investama, pemerintah desa, dan masyarakat; peran BAPPERIDA dan Dispermasdes sebagai mediator kekuasaan di tingkat kabupaten; serta posisi strategis Yayasan Gita Pertiwi sebagai agen transformasi yang mempengaruhi struktur kekuasaan lokal.

Terciptanya praktik sosial baru dan rutinisasi yang menjadi medium beroperasinya kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari karena program CSR dibahas pada 3.1.3 Praktik Sosial dan Rutinisasi Kekuasaan. Pembahasan meliputi analisis kegiatan pengelolaan irigasi dan pertanian berkelanjutan sebagai praktik rutinisasi; transformasi pola interaksi sosial melalui forum-forum program; dan legitimasi kekuasaan melalui narasi pemberdayaan dan konservasi lingkungan.

Ketiga sub-bab ini secara kolektif menunjukkan bahwa program CSR bukan sekadar sarana pembangunan yang netral, melainkan arena

kompleks di mana struktur kekuasaan diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui interaksi dinamis antara berbagai aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang beragam. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan beroperasi dalam konteks pembangunan berbasis kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil.

3.2.1. Permainan Dua Muka: Struktur Formal dan Informal dalam CSR

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Tirta Investama di Desa Juwiring merepresentasikan manifestasi konkret dari konsep dualitas struktur yang dikemukakan oleh Giddens (2004). Dalam konteks ini, terjadi interaksi dialektis di mana struktur kekuasaan yang ada membentuk pelaksanaan program CSR, sementara pada saat yang sama, program CSR justru mentransformasi struktur kekuasaan yang telah ada sebelumnya. Analisis mendalam atas fenomena ini mengungkapkan kompleksitas dualitas struktur dalam tiga dimensi utama: aturan formal dan informal, mekanisme pengambilan keputusan, serta pembentukan struktur otorisasi.

a. Aturan Formal dan Informal dalam Pelaksanaan CSR

Implementasi program CSR di Desa Juwiring lebih banyak diatur oleh kesepakatan informal daripada regulasi formal yang terstruktur. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa Juwiring:

"Kalau untuk aturan formal spesifik tentang CSR di desa, sebenarnya kami belum punya Perdes (Peraturan Desa)

husus yang mengatur itu. Yang ada lebih ke aturan umum tentang kerja sama desa dengan pihak ketiga sesuai UU Desa." (Jarwadi, Sekretaris Desa, wawancara, 21 April 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa pengelolaan relasi kekuasaan dalam konteks program CSR tidak sepenuhnya diatur melalui sistem formal, melainkan lebih banyak bergantung pada kesepakatan tidak tertulis dan praktik sosial yang berulang. Kondisi ini sejalan dengan perspektif Giddens (2004) tentang dualitas struktur di mana aturan formal dan informal saling berinteraksi membentuk praktik sosial.

Secara kontras, di sisi perusahaan terdapat regulasi internal yang lebih terstruktur, sebagaimana diungkapkan oleh Manajer CSR PT Tirta Investama:

"Ada regulasi yang khusus mengatur tentang sosial dan lingkungan sebagai elaborasi dari visi misi kita yang menjadi *dual commitment*. Yang dikeluarkan oleh SK pabrik." (Rama, Manajer CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

Ketidakseimbangan formalitas aturan antara perusahaan dan desa menciptakan situasi di mana perusahaan memiliki kerangka operasional yang lebih terstruktur, sementara desa beroperasi dalam ruang yang lebih fleksibel namun kurang terstruktur. Kondisi ini menciptakan asimetri kekuasaan di mana perusahaan memiliki landasan lebih kuat dalam negosiasi program.

Meskipun demikian, absennya aturan formal di tingkat desa tidak berarti ketiadaan struktur pengaturan. Justru, praktik-praktik

sosial dan kesepakatan tidak tertulis telah membentuk semacam "struktur informal" yang mengatur relasi antaraktor. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Juwiring mengonfirmasi hal ini:

"Sejauh ini kita masih mengikuti pola yang sudah berjalan, yang lebih ke aturan tidak tertulis... kita punya semacam kesepakatan tentang alur koordinasinya bagaimana, yang penting transparansi dan komunikasi terus berjalan baik." (Sakti, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, wawancara, 21 April 2025)

Relasi antara aturan formal dan informal ini menunjukkan bagaimana program CSR tidak sekadar diterapkan dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan dan membentuk kembali struktur yang ada melalui praktik sosial yang berulang. Ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut Giddens sebagai "strukturasi" - proses di mana struktur senantiasa diproduksi dan direproduksi melalui praktik sosial.

b. Transformasi Mekanisme Pengambilan Keputusan Program

Program CSR PT Tirta Investama telah secara signifikan mentransformasi mekanisme pengambilan keputusan di Desa Juwiring. Sebelum adanya program CSR, pengambilan keputusan cenderung hierarkis dan terpusat pada elite desa. Namun, intervensi program CSR telah mendorong berkembangnya model pengambilan keputusan yang lebih kolaboratif dan partisipatif.

Ketua Kelompok Tani Desa Juwiring menggambarkan transformasi ini dengan jelas:

"Kalau untuk pengambilan keputusan, biasanya kita musyawarah dulu di pertemuan *selapanan* itu. Misalnya mau ada program dari Gita Pertiwi, kita bahas dulu bareng-bareng... Saya nggak mutusin sendiri, kita bareng-bareng, karena biar semua ngerasa memiliki program." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Kepala Desa Juwiring juga menekankan penerapan model pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dalam program CSR:

"Keputusan yang akan dikerjakan kan datangnya dari musyawarah terlebih dahulu... Dari pihak mereka itu minta *sing dibutuhne desa iki apa? Desa hambatan apa? Hambatan iki ya dari CSR tak bantu, tak laporke ning aqua nanti tak carikake dana tak gawekne proposale.*" (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Transkrip wawancara mengungkapkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan yang lebih partisipatif ini tidak terbatas pada relasi antara perusahaan dan pemerintah desa, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat secara lebih luas, terutama kelompok tani dan kelompok wanita tani. Ini menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam distribusi kekuasaan pengambilan keputusan.

Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses strukturasi yang berulang, di mana praktik musyawarah dan konsultasi *multistakeholder* yang diperkenalkan melalui program CSR secara bertahap menjadi pola interaksi yang terlembaga. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Kelompok Wanita Tani:

"Setiap tanggal 10 itu kan pertemuan rutin. Nah disitu kita bahas bareng-bareng, misalnya mau ada kegiatan apa, mau tanam apa di kebun, mau masuk program apa. Kita rapatkan. Saya tidak mau memutuskan sendiri, karena yang kerja kan nanti bareng-bareng." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Namun, transformasi ini tidak sepenuhnya merata dan menyeluruh. Warga desa yang tidak terlibat langsung dalam kelompok tani atau program CSR masih merasa termarginalkan dari proses pengambilan keputusan, sebagaimana terungkap dari wawancara dengan pemilik warung:

"Nah iki sing menurutku kurang transparan Mas. Wong mesthi sing dipilih yo kuwi-kuwi wae. Sing wis cedak karo perangkat desa, sing wis aktif nang kelompok. Lha wong-wong cilik sing ora aktif organisasi yo ora tau dijak." (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025)

Kesenjangan persepsi ini menunjukkan bahwa transformasi struktur kekuasaan melalui program CSR cenderung bersifat selektif dan parsial, memperkuat kelompok yang sudah memiliki akses tertentu dan berpotensi memarginalkan kelompok lain. Ini sejalan dengan kritik terhadap teori strukturasi Giddens yang menurut beberapa akademisi kurang memberikan perhatian pada aspek kekuasaan dan ketimpangan dalam proses strukturasi (Whitt & Lukes, 1980).

c. Pembentukan Struktur Otorisasi dalam Pengelolaan Program

Program CSR PT Tirta Investama telah membentuk struktur otorisasi baru dalam tata kelola sumber daya dan

pengambilan keputusan di Desa Juwiring. Struktur otorisasi ini termanifestasi dalam pembentukan lembaga baru dan rekonfigurasi relasi kekuasaan antarlembaga yang sudah ada.

Salah satu contoh nyata adalah terbentuknya Forum Relawan Irigasi yang berperan dalam pengelolaan sistem irigasi di Desa Juwiring. Manajer CSR PT Tirta Investama menjelaskan:

"Program Revitalisasi Jogo Toya Kamulyan (kerja sama Aqua Klaten dengan Forum Relawan Irigasi) mengelola jaringan irigasi seluas 300 ha di 7 desa Juwiring, sekitar 53% dari luas total 569 ha sawah di wilayah tersebut." (Rama, Manajer CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

Pembentukan forum ini menjadi contoh bagaimana program CSR menciptakan struktur otorisasi baru yang mengubah tata kelola sumber daya air yang sebelumnya lebih banyak dikelola secara individual atau kelompok kecil. Perubahan ini dijelaskan oleh salah satu petani penerima manfaat:

"Sebelum ada program CSR ini, kami petani hilir selalu kesulitan mendapatkan air. Kelompok petani di hulu selalu mendominasi. Sekarang ada forum bersama yang difasilitasi perusahaan dan LSM, kami bisa menyampaikan pendapat dan didengarkan. Bahkan kami kini terlibat dalam pengambilan keputusan distribusi air irigasi, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya." (Wati, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

Terbentuknya struktur otorisasi baru juga terlihat dari kolaborasi *multi-level* yang melibatkan BAPERRIDA, pemerintah desa, dan PT Tirta Investama. Kepala Bidang Perekonomian BAPERRIDA menjelaskan peran lembaganya dalam mengoordinasikan program CSR:

"Forum CSR yang diselenggarakan oleh BAPERRIDA dihadiri oleh perwakilan perusahaan dan tokoh desa, sehingga program CSR dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan desa dan prioritas kabupaten." (Sutrisno, BAPERRIDA, wawancara, 16 April 2025)

Koordinasi *multi-level* ini menghasilkan struktur otorisasi yang lebih kompleks, di mana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi di tingkat desa, tetapi terdistribusi dan dinegosiasikan dalam ruang relasi yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor swasta.

Giddens (2004) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam teori strukturasi bukan sekadar kapasitas transformatif, tetapi juga kemampuan untuk mengkoordinasikan tindakan orang lain. Dalam konteks ini, program CSR PT Tirta Investama telah menjadi medium bagi aktor-aktor tertentu untuk mengkonsolidasikan dan mengorganisasi tindakan kolektif, sehingga mentransformasi lanskap kekuasaan di Desa Juwiring.

Namun, pembentukan struktur otorisasi baru ini juga membawa implikasi pada relasi kuasa yang ada. Beberapa aktor yang sebelumnya tidak memiliki posisi kekuasaan formal, seperti pendamping dari Yayasan Gita Pertiwi, kini memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya. Salah satu tokoh masyarakat mencatat:

"Aku nggak sanggup. Terus pada waktu itu rapat pemilihan-pemilihan yang ditunjuk Bu Sari itu di agro, toko agro itu. Bu Sari katanya aku nggak bisa, soalnya di tugas di Jogja. Terus saya yang ditunjuk... akhirnya saya terima." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Kutipan ini menunjukkan bagaimana program CSR telah menciptakan jalur baru dalam pembentukan kepemimpinan lokal yang tidak selalu mengikuti struktur formal yang telah ada sebelumnya.

d. Tabel Dualitas Struktur dalam Program CSR Desa Juwiring

Untuk memperjelas analisis dualitas struktur dalam implementasi CSR di Desa Juwiring, berikut disajikan tabel yang menggambarkan hubungan dialektis antara struktur dan agen:

Tabel 3.2.1. Dualitas Struktur dalam Program Pemberdayaan melalui CSR di Desa Juwiring

Dimensi Strukturasi	Struktur Membentuk Praktik CSR	Praktik CSR Mentransformasi Struktur
Aturan Formal dan Informal	UU Desa No. 6/2014 dan hubungan patronase tradisional membentuk pola implementasi program	Terbentuknya kesepakatan tidak tertulis dan pola koordinasi baru yang tidak sepenuhnya mengikuti struktur formal
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Hierarki desa dan pembagian kekuasaan yang ada membatasi partisipasi aktor tertentu	Berkembangnya model pengambilan keputusan partisipatif melalui forum <i>multistakeholder</i>
Struktur Otorisasi	Otoritas formal pemerintah desa dan pengaruh tokoh tradisional membentuk alur implementasi program	Terbentuknya lembaga baru seperti Forum Relawan Irigasi dan pergeseran otoritas dalam pengelolaan sumber daya

Sumber: diolah oleh peneliti.

Tabel di atas menegaskan bagaimana program CSR PT Tirta Investama di Desa Juwiring tidak sekadar dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada, tetapi juga secara aktif mentransformasi struktur tersebut. Hal ini menegaskan argumen Giddens (2004) bahwa struktur dan agen berada dalam hubungan yang saling membentuk satu sama lain, bukan entitas yang terpisah.

Dualitas struktur dalam implementasi CSR di Desa Juwiring mengungkapkan adanya proses strukturasi yang berlangsung secara berkelanjutan, di mana praktik-praktik sosial yang diperkenalkan melalui program CSR secara bertahap terinstitusionalisasi dan menjadi bagian dari struktur yang nantinya akan membentuk interaksi sosial selanjutnya. Proses ini tidak selalu linear dan seimbang, melainkan sering kali menghasilkan distribusi kekuasaan yang tidak merata, dimana kelompok tertentu mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang lain.

3.2.2. Jaring-jaring Kuasa: Siapa Mendapat Apa dalam Program CSR?

Implementasi program CSR di Desa Juwiring telah menciptakan pola interelasi aktor yang kompleks dan distribusi kekuasaan yang dinamis. Struktur kekuasaan yang terbentuk tidak bersifat monolitik ataupun hierarkis sederhana, melainkan merupakan jaringan relasi yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang berbeda-beda. Analisis mendalam terhadap interelasi aktor mengungkapkan bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dinegosiasikan dalam implementasi program CSR.

a. Pemetaan Relasi antara PT Tirta Investama, Pemerintah Desa, dan Masyarakat

Pola hubungan antara PT Tirta Investama, pemerintah desa, dan masyarakat dalam implementasi program CSR membentuk konfigurasi kekuasaan yang unik. Salah satu karakteristik

utamanya adalah adanya mediasi oleh Yayasan Gita Pertiwi sebagai implementator program, sehingga menciptakan struktur relasi yang kompleks. Sekretaris Desa Juwiring menggambarkan pola hubungan ini:

"Pola hubungannya sebenarnya tidak langsung. Jadi modelnya seperti segitiga: ada PT Tirta Investama, ada Gita Pertiwi sebagai LSM pendamping, dan ada pemerintah desa. PT Tirta Investama sebagai perusahaan yang memberikan CSR, tetapi mereka tidak langsung ke desa, melainkan mereka bekerja sama dengan Gita Pertiwi. Gita Pertiwi inilah yang kemudian berinteraksi dengan kami di desa." (Jarwadi, Sekretaris Desa, wawancara, 21 April 2025)

Pola hubungan segitiga ini menciptakan dinamika kekuasaan yang khas, di mana perusahaan sebagai penyedia dana memiliki kekuasaan ekonomi, Gita Pertiwi sebagai implementator memiliki kekuasaan pengetahuan dan akses ke masyarakat, sedangkan pemerintah desa memiliki kekuasaan legitimasi dan otoritas formal di wilayahnya. Distribusi kekuasaan semacam ini menciptakan ketergantungan antaraktor, namun juga membuka ruang untuk negosiasi dan pertukaran sumber daya.

Manajer CSR PT Tirta Investama menjelaskan posisi perusahaan dalam relasi ini:

"Ada dua tipe, jadi karena kami bukan sebagai *implementation agent*, kami sebagai *supporting system*, Aqua sebagai *financing*. Ada dua hal yang dilakukan *outing direct* yang kami lakukan secara langsung dalam konteks perencanaan dalam konteks musrenbang menggabungkan *project* dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa mengoneksikan kebutuhan di provinsi dan di kabupaten, itu perantara kami. Namun *day to day*-nya untuk mendampingi dan memfasilitasi mereka, kami bermitra

dengan LSM yang disebut di sana Gita Pertiwi menjadi mitra kami." (Rama, Manajer CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

Posisi pemerintah desa dalam relasi ini menarik untuk dicermati. Di satu sisi, pemerintah desa memiliki otoritas formal di wilayahnya, namun di sisi lain, ketergantungan pada sumber daya eksternal membuat posisi tawarnya tidak selalu kuat. Kepala Desa Juwiring mengakui hal ini:

"Saya pribadi tiap kegiatan selalu menghadiri. Kalau ada kegiatan gotong royong di sana ya saya ikut ngecek. *Supaya 'pak lurahe ae terjun kok, mosok petanine ra gelem'. Tapi nggih kula tetep terjun.*" (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Kepala Desa berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui kehadiran fisik dan legitimasi simbolik, meskipun dalam banyak hal program lebih banyak diarahkan oleh dinamika antara PT Tirta Investama dan Gita Pertiwi.

Dari perspektif masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat langsung seperti kelompok tani dan KWT, relasi mereka dengan perusahaan dan pemerintah desa diwarnai kompleksitas tersendiri. Di satu sisi, mereka menerima manfaat dari program CSR, namun di sisi lain, hal ini juga menciptakan ketergantungan dan bentuk-bentuk baru patronase. Salah satu anggota KWT mengungkapkan:

"*Alhamdulillah* dari Gita Pertiwi itu diberikannya bibit itu bukan untuk dibagikan kepada anggota-anggota, Mas. Nanti ditanam, kami menanam bersama, kami memelihara

bersama, kami merawat bersama. Hasilnya nanti dijual untuk kembali lagi untuk anggota bersama seperti itu." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Sementara itu, warga desa yang tidak terlibat langsung dalam program sering kali merasa tereksklusi dari sistem relasi dan distribusi manfaat yang terbentuk. Pemilik warung di desa tersebut menyatakan:

"Mesti sing dipilih yo kuwi-kuwi wae. Sing wis cedak karo perangkat desa, sing wis aktif nang kelompok. Lha wong-wong cilik sing ora aktif organisasi yo ora tau dijak. Kudune lak yo ditawari kabeh warga, njuk ben milih dewe sopo sing pengen melu. Nek ngene iki kesane pilih-pilih wong." (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025)

Pemetaan relasi kekuasaan ini mengungkapkan bahwa program CSR tidak hanya menciptakan manfaat, tetapi juga struktur inklusi dan eksklusi yang membentuk pola distribusi kekuasaan di tingkat desa. Sesuai dengan perspektif Foucault dalam Burchell et al. (1991), kekuasaan dalam konteks ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif, membentuk kategori sosial, identitas, dan relasi baru antaraktor.

b. Peran BAPPERIDA dan Dispermasdes sebagai Mediator Kekuasaan

BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) dan Dispermasdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) memainkan peran strategis sebagai mediator kekuasaan dalam implementasi program CSR di Desa Juwiring. Lembaga-lembaga ini menjembatani kepentingan berbagai pihak

dan secara aktif membentuk arena di mana kekuasaan dinegosiasikan.

Kepala Bidang Perekonomian BAPPERIDA Kabupaten Klaten menjelaskan peran lembaganya:

"Kalau kami lebih berperan yang pertama karena kami instansi pemerintah tentunya sebagai regulator, artinya ada perda, perbup, SK tadi. Kemudian yang kedua mengkoordinasikan sumber daya, artinya karena fungsi BAPPEDA mengkoordinasikan, kami bisa mengkoordinasikan dengan dinas lain yang terlibat seperti DISNAKER, Dinas Kesehatan." (Sutrisno, BAPPERIDA, wawancara, 16 April 2025)

Peran koordinatif ini memberikan kekuasaan struktural kepada BAPPERIDA dalam menentukan alokasi sumber daya CSR di tingkat kabupaten. Melalui mekanisme seperti Musrenbang CSR, BAPPERIDA memiliki pengaruh signifikan dalam mengarahkan fokus program CSR sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

"Di kabupaten Klaten kita melibatkan dunia usaha itu dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Tetapi fungsi kami sebagai advokat hanya memberikan arahan dan masukan supaya kegiatan yang dilakukan oleh CSR dari dunia usaha tepat sasaran, tepat guna, tepat mutu, dan sinkron dengan perencanaan pembangunan ataupun sinkron dengan cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah." (Sutrisno, BAPPERIDA, wawancara, 16 April 2025)

Sementara itu, Dispermasdes berperan lebih fokus pada pembinaan kapasitas desa dalam menyerap dan mengelola program CSR. Kepala Bidang Penataan Administrasi Desa Dispermasdes menjelaskan:

"Kalau untuk CSR, OPD sebagai koordinatornya memang ada di BAPERRIDA. Ada BAPERRIDA, jadi memang sifatnya dari BAPERRIDA. Kami ya, sebenarnya tugas kami itu adalah pembinaan di tingkat desanya, tapi kalau kaitannya khusus dengan CSR-nya itu, kami memang sifatnya menunggu, tidak aktif ke desa supaya desa meminta itu kami tidak. Tapi kami menunggu kalau desa mau melakukan kerja sama, kerja sama dengan perusahaan tertentu, kami yang akan memfasilitasinya." (Adi Nugroho, Dispermasdes, wawancara, 16 April 2025)

Peran kedua lembaga ini menciptakan lapisan mediasi tambahan antara PT Tirta Investama, pemerintah desa, dan masyarakat. Di satu sisi, mediasi ini membantu menyelaraskan program CSR dengan agenda pembangunan yang lebih luas. Namun di sisi lain, lapisan birokrasi tambahan ini juga dapat memperpanjang rantai komunikasi dan menambah kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan.

Dinamika kekuasaan yang terbentuk melalui peran BAPPERIDA dan Dispermasdes juga mencerminkan aspek governmentality seperti yang dikonseptualisasikan oleh Foucault. Program CSR menjadi salah satu teknologi kekuasaan yang melaluinya pemerintah daerah dapat "memerintah dari jarak jauh" (*governing at a distance*), mengarahkan perilaku aktor non-pemerintah untuk mendukung agenda pembangunan tanpa intervensi langsung yang ekstensif.

c. Yayasan Gita Pertiwi sebagai Agen Transformasi dan Pengaruhnya pada Struktur Kekuasaan

Yayasan Gita Pertiwi memainkan peran unik sebagai agen transformasi yang secara signifikan mempengaruhi dinamika

kekuasaan di Desa Juwiring. Sebagai implementator program CSR PT Tirta Investama, Gita Pertiwi tidak hanya menjadi perantara antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga secara aktif membentuk diskursus pembangunan dan praktik sosial di tingkat desa.

Perwakilan Gita Pertiwi menjelaskan pendekatan mereka dalam implementasi program:

"Gita Pertiwi memang lembaga lingkungan. Di mana kami punya visi misi terwujudnya pelestarian lingkungan... Khususnya untuk mengangkat kaum marginal atau kaum-kaum yang di bawah termasuk salah satunya petani. Kalau berbicara isu lingkungan sebenarnya itu karena cukup bertentangan antara Aqua karena dia memproduksi plastik dan sebagainya yang mungkin berbahaya bagi lingkungan, namun di sini kami ingin memastikan bahwa hak dari petani atau kaum marginal yang mau kami angkat itu, mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

Posisi Gita Pertiwi yang berada di antara perusahaan dan masyarakat memberikan LSM ini kekuasaan yang unik untuk menerjemahkan, memodifikasi, dan bahkan mengubah program CSR sesuai dengan visi mereka sendiri. Melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan, Gita Pertiwi menerapkan apa yang Foucault sebut sebagai "teknik diri" (*techniques of the self*), di mana individu (dalam hal ini petani) dilatih untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan norma-norma tertentu.

Kekuasaan yang dimiliki Gita Pertiwi sebagian besar berasal dari pengetahuan teknis dan akses mereka ke masyarakat. Sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam pertanian

berkelanjutan dan pengorganisasian masyarakat, mereka dapat mengarahkan jalannya program sesuai dengan agenda mereka:

" Kalau program, ya ada beberapa yang masih berjalan. Maksudnya tidak semuanya yang pelatihan itu ikut menerapkan. Karena ya namanya warga, mereka punya karakter masing-masing. Ada yang instan, maunya instan, ada yang maunya dia juga buat sendiri. Itu tadi, tetapi apa yang sudah dilatih itu biasanya ada beberapa yang masih berlanjut untuk membuat misalnya seperti pupuk, ya masih berlanjut." (Sakti, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, wawancara, 21 April 2025)

Gita Pertiwi juga berperan dalam menciptakan "*local hero*" atau "*champion*" yang menjadi perpanjangan pengaruh mereka di tingkat desa bahkan setelah program formal berakhir. Hal ini dijelaskan oleh Manajer CSR PT Tirta Investama:

"Ketika di sini sudah *establish*, kita harus *exit strategy* kita harus *exit* dari program agar ada kemandirian kita pindah ke wilayah hilir. Di wilayah hilir yang dilakukan oleh *project* itu menciptakan *local hero* yang menjadi *community organizer* lokal atau fasilitator lokal nantinya. Jadi kalau *project* selesai, kita *exit* mereka akan meneruskan itulah muncul salah satunya Bu Sugiarti." (Rama, Manajer CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

Strategi ini menciptakan lapisan baru dalam struktur kekuasaan desa, di mana "*champion*" ini memiliki status dan pengaruh yang ditingkatkan karena hubungan mereka dengan program CSR. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua KWT:

"*Alhamdulillah* Mas, pertama kali berdiri itu sebenarnya anggotanya banyak sekali, Mas. Satu kelurahan banyak yang mengikuti, sampai 80 atau 75 pertama kali itu, berkumpul-berkumpul, istilahnya baru-baru. Pada waktu itu pertama kali, mendapat dari Aqua pertama kali.." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Pengaruh Gita Pertiwi terhadap struktur kekuasaan juga terlihat dari kemampuan mereka untuk memobilisasi sumber daya dan membentuk opini. Sebagai contoh, upaya mereka dalam mempromosikan pertanian organik tidak hanya mengubah praktik bertani, tetapi juga menggeser diskursus tentang apa yang dianggap sebagai "pertanian yang baik" di desa tersebut. Melalui pelatihan dan pendampingan, mereka memperkenalkan standar dan nilai baru yang secara bertahap terinternalisasi oleh masyarakat.

Peran transformatif Gita Pertiwi ini sejalan dengan konsep "pembentukan subjek" Foucault, di mana kekuasaan tidak hanya menindas atau membatasi, tetapi juga membentuk individu sebagai subjek dengan identitas, kebutuhan, dan aspirasi tertentu. Dalam konteks Desa Juwiring, petani yang terlibat dalam program CSR tidak hanya menerima manfaat material, tetapi juga mengalami transformasi identitas menjadi "petani organik" atau "petani berkelanjutan" dengan seperangkat nilai dan praktik baru.

d. Tabel Interelasi Aktor dan Distribusi Kekuasaan dalam Program CSR

Untuk memvisualisasikan kompleksitas interelasi antar aktor dan distribusi kekuasaan dalam implementasi program CSR di Desa Juwiring, berikut disajikan tabel yang menggambarkan bentuk kekuasaan, sumber kekuasaan, dan pengaruh relatif masing-masing aktor:

Tabel 3.2.2. Interelasi Aktor dan Distribusi Kekuasaan dalam Program CSR

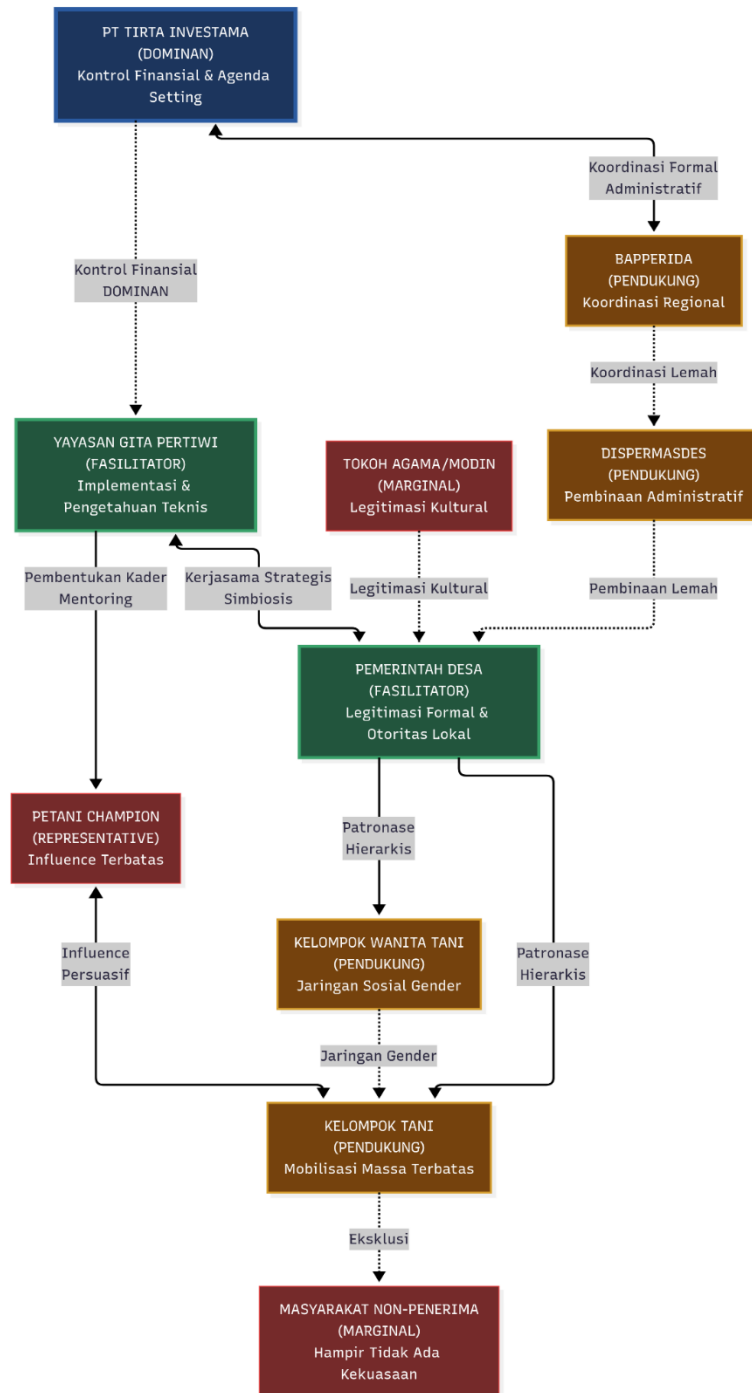
Aktor	Bentuk Kekuasaan	Sumber Kekuasaan	Pengaruh
PT Tirta Investama	Ekonomi, Agenda-setting	Pendanaan, legitimasi sebagai korporasi	Tinggi, dalam menentukan alokasi dana dan fokus program
Pemerintah Desa	Legitimasi, administrasi	Otoritas formal, pengetahuan lokal	Sedang - tinggi, dalam memberikan persetujuan dan memobilisasi dukungan masyarakat
BAPPERIDA	Regulasi, koordinasi	Otoritas formal, kontrol atas kebijakan daerah	Sedang, dalam menyelaraskan program dengan agenda daerah
Dispermasdes	Pembinaan, fasilitasi	Akses ke jaringan pemerintahan dan teknis	Rendah – sedang, dalam pendampingan implementasi program
Yayasan Gita Pertiwi	Implementasi, pengetahuan	Keahlian teknis, akses ke masyarakat	Tinggi, dalam menentukan detail implementasi dan kontak langsung dengan penerima manfaat
Kelompok Tani/KWT	Mobilisasi, legitimasi lokal	Keanggotaan, representasi masyarakat	Sedang, dalam mempengaruhi prioritas program dan manfaat
Masyarakat non-penerima	Resistensi pasif	Opini publik, jaringan informal	Rendah, dalam pengambilan keputusan program

Sumber: diolah oleh peneliti.

Tabel 3.2.2. menggambarkan bahwa kekuasaan dalam implementasi program CSR di Desa Juwiring terdistribusi secara tidak merata, dengan beberapa aktor memiliki pengaruh yang signifikan sementara yang lain relatif termarginalkan, namun kekuasaan ini tidak statis, melainkan dinamis.

e. Peta Relasi Aktor

Bagan 3.2.1. Peta Relasi Kuasa



diolah oleh peneliti.

Interelasi antar aktor juga menunjukkan sifat relasional dari kekuasaan, di mana kekuasaan satu aktor sering bergantung pada

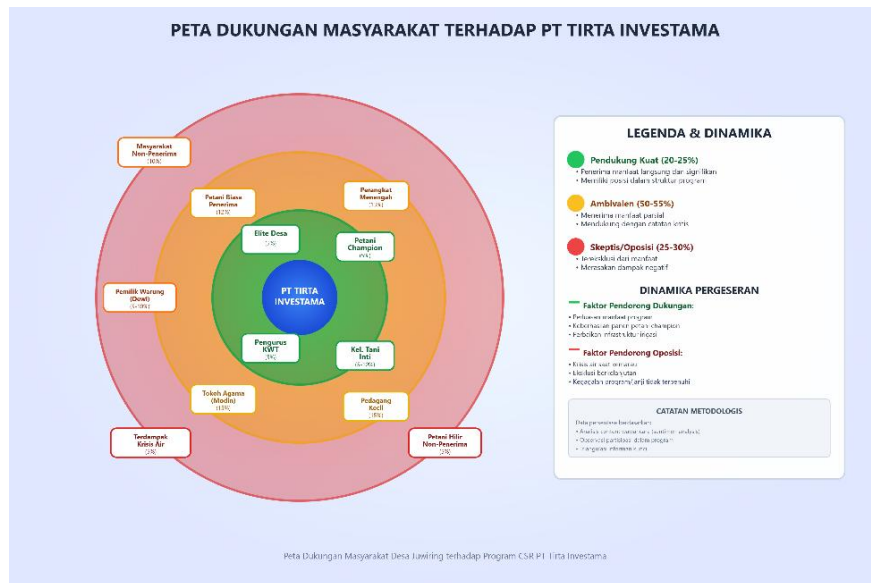
dan dibatasi oleh aktor lain. Sebagai contoh, meskipun PT Tirta Investama memiliki kekuasaan ekonomi yang besar, pengaruhnya terhadap masyarakat lokal bergantung pada mediasi Yayasan Gita Pertiwi dan dukungan dari pemerintah desa. Sebaliknya, pemerintah desa memiliki otoritas formal di wilayahnya, namun ketergantungan pada sumber daya eksternal membatasi otonominya dalam mengarahkan program.

Kompleksitas interelasi aktor dan distribusi kekuasaan ini sesuai dengan perspektif Foucault yang memandang kekuasaan bukan sebagai komoditas yang dimiliki, melainkan sebagai relasi yang dijalankan. Kekuasaan dalam konteks program CSR di Desa Juwiring tidak berasal dari satu sumber tunggal, tetapi tersebar di berbagai titik dan dijalankan melalui beragam mekanisme, dari pertemuan formal hingga interaksi sehari-hari di lapangan.

3.2.3. Eksistensi Aktor Dominan: Antara Dukungan dan Penolakan

Peta dukungan masyarakat terhadap keberadaan PT Tirta Investama di Desa Juwiring menunjukkan kompleksitas relasi sosial yang terbentuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Visualisasi ini menggunakan model lingkaran konsentris dengan PT Tirta Investama sebagai pusat, dikelilingi oleh tiga lapisan masyarakat yang memiliki tingkat dukungan berbeda-beda.

Gambar 3.2.1. Peta Dukungan Masyarakat terhadap Perusahaan



Sumber: diolah oleh peneliti.

Struktur ini tidak hanya menggambarkan distribusi dukungan secara kuantitatif, tetapi juga mengungkap dinamika kekuasaan dan kepentingan yang melatarbelakangi posisi setiap kelompok masyarakat.

a. Lingkaran Pendukung Kuat: Elite Lokal dan Beneficiaries Utama

Lapisan terdalam yang mengelilingi PT Tirta Investama terdiri dari pendukung kuat yang mencakup sekitar 20-25% dari total populasi desa. Kelompok ini didominasi oleh elite desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat senior, yang merepresentasikan sekitar 5% dari populasi. Bagi mereka, kehadiran PT Tirta Investama bukan hanya memberikan manfaat material melalui program CSR, tetapi juga memperkuat legitimasi politik mereka di mata masyarakat. Kemampuan untuk menjadi mediator antara perusahaan dan masyarakat menempatkan mereka

dalam posisi strategis yang menguntungkan, baik secara politis maupun ekonomis.

Petani champion, yang juga mencakup sekitar 5% dari populasi, merupakan kelompok yang secara aktif dipromosikan oleh program CSR sebagai model keberhasilan. Mereka tidak hanya menerima manfaat langsung berupa teknologi pertanian, pupuk, dan akses pasar, tetapi juga mendapat pengakuan simbolik melalui berbagai penghargaan dan exposure media. Status sosial yang meningkat ini menciptakan insentif kuat untuk mempertahankan hubungan positif dengan perusahaan.

Pengurus aktif Kelompok Wanita Tani (KWT) membentuk segmen penting lainnya dalam lingkaran pendukung. Mereka melihat program CSR sebagai peluang pemberdayaan perempuan yang selama ini terbatas aksesnya terhadap program pembangunan. Melalui berbagai pelatihan dan program ekonomi produktif, mereka tidak hanya memperoleh keterampilan baru tetapi juga posisi strategis dalam struktur sosial desa. Kelompok Tani Inti, yang mencakup 5-10% populasi, melengkapi lingkaran pendukung dengan motivasi pragmatis berupa akses teknologi pertanian modern dan jaminan pasar untuk hasil panen mereka.

b. Lingkaran Ambivalen: Pragmatisme dan Kritisisme Terkendali

Mayoritas masyarakat Desa Juwiring, sekitar 50-55%, berada dalam posisi ambivalen terhadap keberadaan PT Tirta

Investama. Kelompok ini terbagi menjadi dua sub-kategori yang mencerminkan gradasi dukungan dan keraguan mereka. Ambivalen positif, yang mencakup sekitar 25% populasi, terdiri dari petani biasa penerima program dan perangkat desa menengah. Mereka mengakui adanya manfaat dari program CSR, namun dengan kesadaran kritis terhadap keterbatasannya.

Petani biasa penerima program, meskipun menerima bantuan, menyadari bahwa manfaat yang mereka terima masih jauh dari optimal. Mereka sering mengungkapkan harapan untuk perluasan program dan pemerataan akses yang lebih baik. Sikap mereka dapat dirangkum dalam pernyataan "manfaat ada tapi belum maksimal", yang mencerminkan apresiasi sekaligus ekspektasi yang belum terpenuhi. Perangkat desa menengah, dengan akses informasi yang lebih baik, memiliki perspektif yang lebih nuanced. Mereka mendukung program CSR namun tetap aware terhadap keterbatasan dan potensi masalah yang mungkin muncul.

Sub-kategori ambivalen netral, yang mencakup 25-30% populasi, menunjukkan sikap yang lebih reserved. Tokoh agama seperti modin, dengan posisi moralnya dalam masyarakat, memberikan dukungan umum namun tetap mempertahankan sikap kritis terhadap motif perusahaan. Kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan agenda tersembunyi mencerminkan skeptisisme yang sehat terhadap keterlibatan korporasi dalam urusan desa. Pedagang

kecil, yang tidak terdampak langsung oleh program pertanian, memiliki sikap yang relatif acuh namun tidak antagonistik, dengan prinsip "terserah, yang penting tidak merugikan".

c. Lingkaran Skeptis dan Oposisi: Suara Terpinggirkan

Lapisan terluar dari peta dukungan ini dihuni oleh kelompok skeptis dan oposisi yang mencakup 25-30% populasi. Kelompok ini terbagi menjadi skeptis pasif dan oposisi aktif, dengan intensitas kritik yang berbeda namun sama-sama berakar pada pengalaman eksklusi dan marginalisasi. Skeptis pasif, sekitar 15-20% populasi, terdiri dari masyarakat non-penerima dan pemilik warung seperti Dewi. Mereka tidak secara aktif menentang kehadiran perusahaan, namun memiliki pandangan kritis terhadap selektivitas program CSR.

Masyarakat non-penerima sering mengartikan program CSR sebagai "program pilih kasih" yang tidak memberikan keadilan distributif. Meskipun tidak melakukan resistensi terbuka, sikap skeptis mereka tercermin dalam non-partisipasi dan komentar kritis dalam diskusi informal. Pemilik warung seperti Dewi mengalami eksklusi sistemik karena kriteria program yang tidak mengakomodasi keragaman mata pencaharian di desa. Resistensi mereka lebih bersifat simbolik melalui non-partisipasi daripada konfrontasi langsung.

Oposisi aktif, meskipun hanya sekitar 10% dari populasi, memiliki suara yang signifikan karena legitimasi keluhan mereka. Warga yang terdampak krisis air merasakan ironi dari kehadiran perusahaan air kemasan di tengah kesulitan mereka mengakses air bersih. Program CSR bagi mereka lebih terlihat sebagai "ganti rugi murah" yang tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Petani hilir non-penerima mengalami dampak langsung dari operasi perusahaan berupa berkurangnya akses air untuk irigasi, namun tidak mendapat kompensasi yang memadai melalui program CSR.

3.2.4. Normalisasi Dominasi: Kekuasaan Menjadi 'Normal' Melalui CSR

Program CSR PT Tirta Investama di Desa Juwiring telah mentransformasi praktik sosial sehari-hari dan menciptakan rutinisasi baru yang menjadi medium bagi beroperasinya kekuasaan. Sesuai dengan teori strukturisasi Giddens (2004), kekuasaan tidak hanya terwujud dalam struktur formal, tetapi juga terinternalisasi dan direproduksi melalui praktik sosial yang berulang. Analisis terhadap dimensi ini mengungkapkan bagaimana program CSR membentuk rutinisasi yang mempengaruhi relasi kekuasaan di desa.

a. Analisis Kegiatan Pengelolaan Irigasi dan Pertanian Berkelanjutan sebagai Praktik Rutinisasi

Program pengelolaan irigasi dan pertanian berkelanjutan yang diimplementasikan melalui CSR PT Tirta Investama telah

membentuk praktik rutin baru yang mengubah pola relasi antaraktor di Desa Juwiring. Salah satu praktik signifikan adalah kegiatan gotong royong pembersihan saluran irigasi yang kini menjadi kegiatan rutin di desa tersebut. Kepala Desa Juwiring menjelaskan:

"Biasanya setiap satu minggu sekali setiap malam Senin sampai Senin sore itu jatahnya Juwiring. Tetapi hanya satu blok atau dua blok, nanti di blok lain yang belum dapat air di minggu depannya. Terhubung seperti itu sampai beberapa tahun lalu... Akhirnya didata oleh pemerintah desa dan kelompok tani perwakilan dari desa dengan CSR Gita Pertiwi, setelah didata ternyata ada *talud* pintu air yang rusak dan beberapa tahun tidak diganti." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Praktik gotong royong ini tidak sekadar aktivitas fisik, tetapi juga menjadi arena di mana kekuasaan dijalankan dan dinegosiasikan. Melalui kegiatan ini, terciptanya pola koordinasi baru antara kelompok tani, pemerintah desa, dan pendamping dari Gita Pertiwi. Salah satu petani penerima manfaat menjelaskan:

"Nek pas kumpulan nggih saged usul mas, tapi nggih biasane sing nemtokke niku penguruse. Kulo mboten masalah, selagi programipun sae lan manfaat." (Wati, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

Selain kegiatan pengelolaan irigasi, praktik pertanian berkelanjutan juga telah menjadi rutinisasi baru yang membentuk relasi kekuasaan. Produksi pupuk organik dan pestisida nabati yang diperkenalkan melalui program CSR kini menjadi kegiatan rutin yang melibatkan kelompok tani dan KWT. Kegiatan ini tidak hanya mengubah pola bertani, tetapi juga membentuk

ketergantungan baru dan relasi kekuasaan berbasis pengetahuan.

Ketua Kelompok Tani menjelaskan:

"Inovasi yang banyak dirasakan ya itu tentang pupuk organik sama pestisida nabati. Sekarang petani banyak yang bisa bikin sendiri. Dulu kan pakai kimia semua, sekarang sudah campuran, bahkan ada yang sudah lepas kimia, pakai nabati semua." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Praktik rutinisasi ini membentuk apa yang disebut Giddens sebagai "kesadaran praktis" (*practical consciousness*), di mana aktor mengembangkan pemahaman *tacit* tentang "bagaimana melakukan sesuatu" dalam konteks sosial tertentu. Kesadaran praktis ini memungkinkan reproduksi struktur kekuasaan tanpa perlu artikulasi eksplisit, karena terinternalisasi dalam kebiasaan sehari-hari.

Menariknya, rutinisasi ini juga menciptakan perbedaan status dan kekuasaan baru di antara petani. Mereka yang aktif mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan mendapatkan status sebagai "petani *champion*" atau "*local hero*", sementara yang tidak atau belum mengadopsi praktik tersebut menjadi kurang terlihat dalam struktur kekuasaan baru. Perwakilan Gita Pertiwi menjelaskan:

"Kalau itu pasti ada tantangan tersendiri, kalau kami meyakinkan semua warga kami itu dengan menciptakan *champion* petani *champion* tadi jadi ketika ada misalkan kami membahas tentang pembuatan pupuk dan sebagainya itu yang mengisi dari petani atau kami membuat testimoni dari petani itu yang sudah melakukan seperti itu sampai akhirnya mereka jadi bercerita itu bukan dari kami tetapi

dari petani yang sudah menerapkan itu.." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

Pembentukan "*champion*" ini tidak sekadar pengakuan atas keberhasilan, tetapi juga strategi untuk menciptakan "model" yang diharapkan dapat diikuti oleh petani lain. Dari perspektif Foucault, ini dapat dipandang sebagai bentuk "normalisasi", di mana standar tertentu ditetapkan dan individu didorong untuk menyesuaikan diri, sehingga menghasilkan subjek yang "berdisiplin" sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh program.

b. Transformasi Pola Interaksi Sosial melalui Forum-forum Program

Program CSR PT Tirta Investama telah menciptakan berbagai forum baru yang mengubah pola interaksi sosial di Desa Juwiring. Forum-forum ini tidak hanya menjadi ruang untuk pertukaran informasi, tetapi juga arena di mana kekuasaan dipraktikkan dan legitimasi dibangun. Salah satu forum yang signifikan adalah pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menjadi medium penting dalam implementasi program. Ketua KWT menjelaskan:

"Setiap bulan pasti ada pertemuan setiap tanggal 10... Karena petani itu mereka ke sawah dan sebagainya, hari-harinya. Jadi kami menyesuaikan saja, bukan yang kami tentukan hari ini harus ini, bukan. Tetapi kami yang mengikuti jadwal dari mereka." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Forum lain yang dibentuk melalui program CSR adalah sekolah lapang (SL) untuk pembelajaran pertanian berkelanjutan.

Forum ini berfungsi tidak hanya sebagai ruang pembelajaran, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menanamkan nilai-nilai dan praktik baru yang sesuai dengan agenda program. Perwakilan Gita Pertiwi menjelaskan:

"Kami masih menentukan tanggal berapa kami akan bertemu, makanya kami akan menyesuaikan fase-fase apa. Itu kalau misalkan secara sekolah lapang, tetapi kami juga biasanya tetap, kalau kami tidak ada agenda atau apa, kami ke lapangan, khususnya Bu Ratih berkeliling bertemu petani." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

Forum-forum ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga menciptakan hierarki baru berdasarkan partisipasi dan akses. Mereka yang aktif dalam forum-forum ini mendapatkan akses lebih besar terhadap informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan, sementara mereka yang tidak berpartisipasi menjadi termarginalkan. Pemilik warung yang tidak terlibat dalam program mengungkapkan:

"Aku ora ngerti detaile piye, tapi jane nek perusahaan gede koyok ngono kuwi yo mesthi ono dampake. Sing positif yo ono, sing negatif yo ono. Sing jelas, nek masalah banyu kuwi memang dadi masalah nang kene." (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025)

Selain itu, forum-forum program juga menciptakan keterhubungan baru antara desa dengan jaringan yang lebih luas. Melalui studi banding, kunjungan, dan pertemuan multi-pihak, aktor desa kini terhubung dengan jaringan pengetahuan dan kekuasaan yang lebih luas. Ketua Kelompok Tani menjelaskan pengalamannya:

"Saya itu di situ, Mas. Saya angkat programnya, positifnya saya dapat ilmu dari Gita Pertiwi. Kami bertiga memang, tetapi yang ditunjuk saya, saya jadi narasumber lima kecamatan se-kabupaten Klaten. Petani *champion* saya akhir awal-awal tahun itu saya dapat petani *award* dari Bupati Klaten." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Transformasi pola interaksi sosial ini sejalan dengan konsep "teknologi sosial" Foucault, di mana forum dan pertemuan menjadi mekanisme untuk mengatur perilaku dan membentuk subjek. Forum-forum ini berfungsi sebagai ruang di mana norma-norma ditetapkan, perilaku dipantau, dan individu yang "berkinerja baik" diberi pengakuan, sehingga mendorong internalisasi dan reproduksi struktur kekuasaan.

c. Legitimasi Kekuasaan melalui Narasi Pemberdayaan dan Konservasi

Program CSR PT Tirta Investama di Desa Juwiring menggunakan narasi pemberdayaan dan konservasi lingkungan untuk melegitimasi intervensi dan struktur kekuasaan yang terbentuk. Narasi ini tidak hanya membingkai tujuan program, tetapi juga mendefinisikan "masalah" yang perlu diselesaikan dan "solusi" yang dianggap tepat, sehingga mengarahkan diskursus dan praktik di tingkat desa.

Narasi pemberdayaan menekankan pentingnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Manajer CSR PT Tirta Investama menjelaskan pendekatan ini:

"Secara prinsip memang sifatnya hanya mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan menawarkan. Kami tidak punya kompetensi untuk memaksa misal perusahaan harus bergerak di sini, tidak ada." (Rama, Manajer CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

Melalui narasi ini, intervensi program dibingkai sebagai "pendampingan" atau "fasilitasi" daripada "bantuan" atau "*charity*", sehingga meminimalkan kesan adanya relasi kekuasaan asimetris. Pendekatan ini memungkinkan program untuk mempengaruhi praktik masyarakat tanpa terlihat dominatif.

Narasi konservasi lingkungan juga menjadi kekuatan legitimasi yang kuat dalam program. Dengan menekankan pentingnya menjaga sumber daya air dan tanah, program dapat menjustifikasi perubahan praktik pertanian tradisional menuju model yang lebih "berkelanjutan". Perwakilan Gita Pertiwi menjelaskan:

"Ketika kami menggunakan pupuk organik pun itu juga akan memengaruhi kesuburan tanah itu sendiri. Karena itu juga berdampak ke lingkungan. Sebenarnya di tahun ini kami mendorong untuk kualitas air, dengan ketika mereka menggunakan pupuk organik karena mereka menggunakan pupuk kimia. Bagaimana kualitas airnya yang ada di dalam tanah itu dan kami biasanya melakukan itu melalui uji." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

Dalam konteks desa yang menghadapi masalah irigasi, narasi konservasi menjadi sangat relevan dan sulit ditentang, meskipun implementasinya mungkin mengubah relasi kekuasaan yang ada. Salah satu petani penerima manfaat mengungkapkan:

"Sakniki kulo mboten mbakar sampah daun mas, tapi didamel kompos. Riyin niku gampang dibakar mawon, padahal niku nggih nyebabake polusi. Sakniki sampun ngertos carane ngolah limbah dadi manfaat." (Wati, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

Legitimasi juga dibangun melalui penggunaan simbol dan ritual, seperti acara peresmian, kunjungan pejabat, atau pemberian penghargaan. Acara-acara ini tidak hanya menandai pencapaian program, tetapi juga memperkuat hubungan hierarkis antara pemberi dan penerima. Kepala Bidang Perekonomian BAPPERIDA menjelaskan salah satu ritual legitimasi ini:

"Kita ada, secara umum baik kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten, provinsi, nasional, bahkan dunia usaha. Itu kan terutama program yang diberikan kepada masyarakat, kami berharap program tersebut sebaiknya katalis." (Sutrisno, BAPPERIDA, wawancara, 16 April 2025)

Dari perspektif Foucault, narasi pemberdayaan dan konservasi dapat dipandang sebagai bentuk "rezim kebenaran" yang mendefinisikan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dan tindakan yang tepat. Melalui narasi ini, program CSR tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membentuk cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan agenda program.

Modin Desa Juwiring mengungkapkan perspektif kritis terhadap narasi legitimasi ini:

"Tantangannya ya itu tadi, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa program CSR ini adalah bentuk kepedulian perusahaan, bukan untuk "membeli" sesuatu atau ada kepentingan tersembunyi. Kadang ada anggapan di masyarakat, "oh ini pasti karena PT Tirta Investama mengambil air kita, makanya mereka kasih program ini"

sebagai ganti rugi."" (Iqbal, Modin, wawancara, 24 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa narasi legitimasi tidak selalu diterima secara pasif, tetapi juga dipertanyakan dan dinegosiasikan oleh aktor desa dalam konteks pemahaman mereka sendiri tentang motivasi dan dampak program CSR.

d. Pola Rutinisasi dan Legitimasi Kekuasaan dalam Program CSR

Untuk memvisualisasikan hubungan antara praktik rutinisasi dan legitimasi kekuasaan dalam program CSR di Desa Juwiring, berikut disajikan tabel yang menggambarkan mekanisme dan dampaknya:

Tabel 3.2.3. Pola Rutinisasi dan Legitimasi Kekuasaan dalam Program

Praktik Rutinisasi	Mekanisme Kekuasaan	Narasi Legitimasi	Dampak pada Struktur Kekuasaan
Pertemuan Rutin KWT/ Kelompok Tani	Pengaturan agenda, kontrol informasi, pembentukan konsensus	Pemberdayaa, partisipasi, kemandirian	Membentuk elite baru berbasis partisipasi dalam program
Produksi Pupuk Organik/Pestisida Nabati	Transfer pengetahuan, pembentukan ketergantungan teknis, pemantauan implementasi	Pertanian berkelanjutan, kesehatan, ekonomi	Menciptakan hierarki baru berbasis penguasaan teknologi
Sekolah Lapang Pertanian	Normalisasi, kategorisasi, evaluasi	Peningkatan kapasitas, inovasi, modernisasi	Melegitimasi pengetahuan "eksternal" di atas pengetahuan lokal
Gotong Royong Pengelolaan Irigasi	Mobilisasi kolektif, standarisasi praktik, pengawasan	Konservasi air, solidaritas, tradisi lokal	Mengubah pola akses dan kontrol terhadap sumber daya air
Forum Evaluasi dan Pelaporan	Akuntabilitas selektif, pendokumentasian, pembentukan memori institusional	Transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan	Membentuk struktur pengawasan dan kontrol program

Sumber: diolah oleh peneliti.

Tabel 3.2.3. menunjukkan bahwa praktik rutinisasi dalam program CSR tidak sekadar aktivitas teknis, tetapi juga menjadi medium bagi beroperasinya kekuasaan. Melalui praktik-praktik ini, struktur kekuasaan diproduksi dan direproduksi setiap hari, sering kali tanpa disadari oleh aktor yang terlibat karena terinternalisasi dalam kebiasaan dan dianggap sebagai "cara normal" untuk melakukan sesuatu.

Analisis ini sejalan dengan perspektif Giddens tentang rutinisasi sebagai mekanisme penting dalam strukturisasi. Praktik sosial yang berulang menciptakan "rasa aman ontologis" (*ontological security*) bagi aktor, sehingga mereka cenderung mereproduksi struktur yang ada tanpa mempertanyakannya secara kritis. Pada saat yang sama, rutinisasi juga membuka kemungkinan bagi perubahan struktural, karena praktik sosial dapat dimodifikasi atau ditransformasi seiring waktu melalui reflektivitas aktor.

Dari perspektif Foucault, rutinisasi dapat dipandang sebagai bagian dari "mikrofisika kekuasaan", di mana kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui institusi formal, tetapi juga melalui praktik-praktik kecil dan sehari-hari yang membentuk tubuh, pikiran, dan perilaku individu. Melalui rutinisasi, program CSR dapat membentuk "tubuh yang patuh" (*docile bodies*) yang bertindak sesuai dengan norma-norma yang diharapkan tanpa perlu paksaan eksternal.

3.2.5. Refleksivitas dan Monitoring Kekuasaan

Dimensi krusial dalam strukturisasi kekuasaan melalui program CSR di Desa Juwiring adalah kapasitas aktor untuk merefleksikan posisi mereka dalam struktur kekuasaan dan melakukan monitoring terhadap tindakan mereka sendiri serta tindakan aktor lain. Sesuai dengan teori strukturisasi Giddens (2004), refleksivitas merupakan ciri utama dari agensi manusia yang memungkinkan aktor untuk tidak hanya mengikuti struktur secara pasif, tetapi juga secara aktif menafsirkan, memodifikasi, dan terkadang menentang struktur tersebut. Analisis terhadap dimensi ini mengungkapkan kompleksitas interaksi antara refleksivitas, kekuasaan, dan perubahan struktural dalam konteks program CSR.

a. Kesadaran Diskursif Aktor Desa dalam Menghadapi Program CSR

Kesadaran diskursif merujuk pada kemampuan aktor untuk mengartikulasikan secara verbal pemahaman mereka tentang kondisi dan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam konteks program CSR di Desa Juwiring, berbagai aktor menunjukkan tingkat kesadaran diskursif yang berbeda-beda dalam memahami dan merespons struktur kekuasaan yang terbentuk.

Kepala Desa Juwiring menunjukkan kesadaran diskursif tentang posisinya sebagai mediator antara perusahaan dan masyarakat:

"Dari pihak mereka itu minta sing dibutuhne desa iki apa? Desa hambatane apa? Hambatane iki ya dari CSR tak bantu, tak laporke ning aqua nanti tak carikake dana tak gawekne proposale." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak hanya memahami perannya dalam struktur kekuasaan, tetapi juga secara aktif memanfaatkan posisi tersebut untuk mengartikulasikan kebutuhan desa kepada pihak perusahaan. Kesadaran diskursif seperti ini memungkinkan Kepala Desa untuk menavigasi struktur kekuasaan yang kompleks dan memaksimalkan manfaat bagi desa.

Ketua Kelompok Tani menunjukkan kesadaran diskursif tentang transformasi yang terjadi dalam praktik pertanian dan implikasinya bagi posisi petani:

"Sekarang petani banyak yang bisa bikin sendiri. Dulu kan pakai kimia semua, sekarang sudah campuran, bahkan ada yang sudah lepas kimia, pakai nabati semua. Terus juga cara pengolahan tanah yang lebih baik, nggak dibakar lagi." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Kesadaran ini tidak hanya mencakup perubahan teknis dalam praktik pertanian, tetapi juga pergeseran dalam relasi kekuasaan di mana petani menjadi lebih mandiri dari ketergantungan pada input eksternal, meskipun pada saat yang sama mereka juga menjadi lebih terikat pada sistem pengetahuan baru yang diperkenalkan melalui program CSR.

Sementara itu, warga desa yang tidak terlibat dalam program menunjukkan kesadaran diskursif yang kritis terhadap selektivitas program dan implikasinya bagi struktur inklusi-eksklusi di desa:

"Yo jelas durung to Mas. Wong mung kanggo sebagian wong tok. Nek mau bener-bener sesuai kebutuhan, yo kudu didelok kabeh kebutuhan masyarakat, ora mung petani. Misale nggo sing dodolan koyok aku ngene iki, mungkin iso diwenehi pelatihan manajemen warung, utowo carane nambah panganan sing didol." (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahkan aktor yang relatif termarginalkan dalam struktur kekuasaan yang ada memiliki kapasitas untuk menganalisis secara kritis struktur tersebut dan mengartikulasikan alternatif yang lebih inklusif. Kesadaran diskursif semacam ini menjadi dasar bagi potensi resistensi dan perubahan struktur.

Modin Desa Juwiring menunjukkan kesadaran diskursif yang memadukan perspektif agama dengan analisis kritis terhadap program CSR:

"Kalau menurut saya sebagai tokoh agama, program CSR ini secara umum positif ya. Dalam Islam sendiri kan ada ajaran tentang saling tolong-menolong dan berbagi manfaat. Program CSR ini bisa dilihat sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar... Tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya bagaimana program ini bisa lebih merata manfaatnya, tidak hanya untuk kelompok tertentu saja." (Iqbal, Modin, wawancara, 24 April 2025)

Kesadaran diskursif yang beragam ini menunjukkan bahwa aktor desa tidak sekadar objek pasif dari program CSR, melainkan

subjek yang secara aktif menafsirkan, menegosiasikan, dan terkadang menentang struktur kekuasaan yang terbentuk. Hal ini sejalan dengan perspektif Giddens tentang dualitas struktur, di mana struktur tidak hanya membatasi tetapi juga memungkinkan tindakan agensi.

b. Mekanisme Monitoring Refleksif Tindakan Kolektif

Program CSR di Desa Juwiring telah membentuk berbagai mekanisme monitoring refleksif yang memungkinkan aktor untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan mereka sendiri serta tindakan aktor lain. Mekanisme ini penting dalam strukturisasi kekuasaan karena memungkinkan reproduksi struktur melalui penyesuaian tindakan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari monitoring.

Salah satu mekanisme monitoring refleksif adalah forum evaluasi yang diselenggarakan oleh Gita Pertiwi. Perwakilan Gita Pertiwi menjelaskan:

"Kalau evaluasi dan monitoringnya, kami ada monitoring, evaluasi juga ada entah itu dalam forum atau bukan, karena di masing-masing kadang-kadang sekolah lapang itu ada evaluasinya sendiri, tetapi secara program keseluruhan juga ada, yang menggabungkan karena kami program itu ada beberapa karena ada yang *regen agri*, ada irigasi dan *business*, yang mempertemukan ketiga ini dalam forum pun kami ada evaluasi di akhir.." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

Forum evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga

sebagai ruang di mana berbagai aktor dapat merefleksikan posisi mereka dan menyesuaikan tindakan mereka untuk periode selanjutnya. Proses ini mencerminkan apa yang disebut Giddens sebagai "monitoring refleksif tindakan" (*reflexive monitoring of action*), di mana aktor secara rutin mengamati dan meregulasi aliran aktivitas mereka dalam konteks sosial di mana mereka beroperasi.

Mekanisme monitoring lain adalah sistem pelaporan yang memungkinkan aliran informasi dari tingkat implementasi ke tingkat pengambilan keputusan. Sekertaris Desa menjelaskan:

"Oh bersama-sama dari desa ada dokumentasinya dan kebetulan dari Mbak Sakti dari bidang pelayanan, kalau dari saya pribadi hanya verifikasi dan mungkin sedikit untuk menyusun saja kalau kami mengambil saya sendiri terus mendokumentasikan jarang-jarang itu dari PKA yang menangani masing-masing.." (Jarwadi, Sekertaris Desa, wawancara, 21 April 2025)

Sistem pelaporan ini menciptakan struktur akuntabilitas tertentu, di mana tindakan aktor di tingkat lokal dipantau dan dievaluasi oleh aktor di tingkat yang lebih tinggi. Dari perspektif Foucault, ini dapat dipandang sebagai bentuk "*panoptikon*", di mana kesadaran bahwa tindakan mereka dipantau mendorong aktor untuk menginternalisasi norma-norma yang ditentukan oleh program dan meregulasi perilaku mereka sendiri bahkan tanpa pengawasan langsung.

Selain mekanisme formal, terdapat juga mekanisme monitoring informal melalui interaksi sehari-hari dan jaringan sosial. Ketua KWT menjelaskan:

"Aku nggak sanggup. Terus pada waktu itu rapat pemilihan-pemilihan yang ditunjuk Bu Sari itu di toko agro itu. Bu Sari katanya aku nggak bisa, soalnya di tugas di Jogja. Terus saya yang ditunjuk... akhirnya saya terima."
(Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya mekanisme monitoring sosial yang didasarkan pada norma-norma komitmen dan tanggung jawab bersama. Melalui mekanisme ini, aktor di desa saling mengawasi dan memastikan bahwa tindakan kolektif tetap terarah pada tujuan bersama.

Mekanisme monitoring refleksif ini tidak bersifat netral, tetapi dibentuk oleh dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Aktor dengan akses lebih besar ke informasi dan sumber daya (seperti PT Tirta Investama dan Gita Pertiwi) memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menetapkan parameter monitoring dan menafsirkan hasil monitoring sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh kesadaran diskursif aktor desa, mekanisme monitoring juga dapat menjadi arena di mana struktur kekuasaan dinegosiasikan dan ditantang.

c. Adaptasi Aktor terhadap Perubahan Struktur Kekuasaan

Perubahan struktur kekuasaan yang terjadi melalui program CSR PT Tirta Investama telah memicu berbagai bentuk adaptasi

dari aktor di Desa Juwiring. Adaptasi ini mencerminkan kapasitas refleksif aktor untuk memahami perubahan struktur dan menyesuaikan tindakan mereka untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka dalam struktur kekuasaan baru.

Kepala Desa Juwiring menunjukkan adaptasi strategis dengan mengintegrasikan program CSR ke dalam agenda pemerintahan desa dan secara aktif terlibat dalam implementasi program untuk mempertahankan otoritas formalnya:

"Saya pribadi tiap kegiatan selalu menghadiri. Kalau ada kegiatan gotong royong di sana ya saya ikut ngecek. *Supaya 'pak lurahe ae terjun kok, mosok petanine ra gelem'. Tapi nggih kula tetep terjun.*" (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Adaptasi ini menunjukkan bagaimana aktor dengan posisi kekuasaan formal dapat merespons perubahan dalam lanskap kekuasaan dengan mengambil peran baru yang memperkuat legitimasi mereka dalam konteks yang berubah.

Kelompok tani dan KWT menunjukkan adaptasi transformatif dengan mengembangkan kapasitas baru dan mengambil posisi sebagai "petani *champion*" atau "*local hero*" dalam struktur kekuasaan baru:

"*Iyo, bener kuwi. Sakniki kulo nggih sampun ngertos carane ngopeni tanah. Riyin mboten ngertos nek tanah niku perlu dirawat, sakniki sampun paham. Dados mboten sembarang nyemprot pestisida.*" (Wati, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

Adaptasi ini mencerminkan bagaimana aktor yang sebelumnya mungkin memiliki posisi kurang dominan dapat

memanfaatkan perubahan struktur untuk memperoleh status dan pengaruh baru melalui penguasaan pengetahuan dan praktik yang dihargai dalam struktur kekuasaan baru.

Sementara itu, warga desa yang tidak terlibat langsung dalam program menunjukkan adaptasi defensif dengan tetap mempertahankan sikap skeptis terhadap program dan memfokuskan energi mereka pada aktivitas di luar lingkup program:

"Wah, sing jelas aku sibuk dodolan Mas. Warung iki bukak e seko jam 7 esuk tekan jam 6 sore. Dadine aku yo ora duwe waktu melu kumpulan-kumpulan ngono kuwi. Nek ditinggal, mosok warung ditutup, aku malah ora oleh duit." (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025)

Adaptasi ini dapat dipandang sebagai bentuk resistensi pasif terhadap struktur kekuasaan baru yang dirasakan tidak mengakomodasi kepentingan mereka.

Tokoh agama seperti Modin menunjukkan adaptasi integratif dengan berupaya memadukan nilai-nilai agama dengan program CSR untuk mempertahankan relevansi mereka dalam struktur kekuasaan baru:

"Sebagai modin, saya tidak langsung terlibat dalam programnya, tapi saya sering memanfaatkan forum pengajian atau ceramah untuk menyisipkan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bertani dengan cara yang baik." (Iqbal, Modin, wawancara, 24 April 2025)

Adaptasi ini menunjukkan bagaimana aktor dengan basis kekuasaan tradisional dapat mempertahankan pengaruh mereka

dalam konteks perubahan dengan menerjemahkan program baru ke dalam kerangka nilai yang sudah ada.

Berbagai bentuk adaptasi ini mencerminkan apa yang disebut Giddens sebagai "kesadaran praktis" (*practical consciousness*), di mana aktor mengembangkan pemahaman *tacit* tentang bagaimana beroperasi secara efektif dalam struktur sosial tertentu. Adaptasi tidak selalu melibatkan artikulasi eksplisit tentang strategi atau tujuan, tetapi sering kali merupakan penyesuaian inkremental berdasarkan pengalaman dan umpan balik yang diperoleh dari interaksi sehari-hari.

d. Tabel Refleksivitas dan Adaptasi dalam Strukturalisasi Kekuasaan

Untuk memvisualisasikan hubungan antara refleksivitas, monitoring, dan adaptasi dalam strukturalisasi kekuasaan melalui program CSR di Desa Juwiring, berikut disajikan tabel yang menggambarkan dinamika ini untuk berbagai aktor:

Tabel 3.2.4 Refleksivitas dan Adaptasi dalam Strukturalisasi Kekuasaan

Aktor	Kesadaran Diskursif	Mekanisme Monitoring	Bentuk Adaptasi	Implikasi Strukturalisasi Kekuasaan
Kepala Desa/ Perangkat Desa	Pemahaman tentang peran sebagai mediator dan gatekeeper	Pertemuan koordinasi, sistem pelaporan, kehadiran langsung di lapangan	Adaptasi strategis: integrasi program ke dalam agenda desa	Mempertahankan otoritas formal sambil mengakomodasi struktur kekuasaan baru

Kelompok Tani/KWT	Pemahaman tentang transformasi praktik pertanian dan implikasinya	Forum evaluasi, pertemuan rutin, pembelajaran antar petani	Adaptasi transformatif : pengembangan kapasitas dan identitas baru	Memperoleh status dan pengaruh baru dalam struktur kekuasaan berbasis pengetahuan
Warga Non-penerima Manfaat	Pemahaman kritis tentang selektivitas program dan eksklusi	Pengamatan informal, interaksi dengan penerima manfaat	Adaptasi defensif: fokus pada aktivitas di luar lingkup program	Mempertahankan otonomi relatif sambil tetap termarginalkan dari struktur kekuasaan dominan
Tokoh Agama/Adat	Pemahaman integratif yang memadukan nilai tradisional dengan program baru	Forum keagamaan, interaksi dengan berbagai kelompok	Adaptasi integratif: penerjemahan program ke dalam kerangka nilai yang ada	Mempertahankan relevansi dalam struktur yang berubah melalui mediasi kultural
Gita Pertiwi	Pemahaman komprehensif tentang dinamika program dan konteks lokal	Sistem evaluasi formal, kehadiran rutin di lapangan	Adaptasi fasilitatif: penyesuaian pendekatan berdasarkan respons lokal	Memperkuat posisi sebagai mediator pengetahuan dan sumber daya
PT Tirta Investama	Pemahaman strategis tentang CSR sebagai investasi sosial	Laporan program, kunjungan lapangan, forum evaluasi	Adaptasi institusional: penyesuaian program berdasarkan dinamika lokal	Mempertahankan kendali strategis sambil mengakomodasi konteks lokal

Sumber: diolah oleh peneliti.

Tabel 3.2.4. menunjukkan bahwa berbagai aktor memiliki tingkat kesadaran diskursif, mekanisme monitoring, dan bentuk adaptasi yang berbeda-beda, yang bersama-sama membentuk dinamika strukturisasi kekuasaan yang kompleks. Tidak ada aktor yang sepenuhnya dominan atau sepenuhnya terdominasi; sebaliknya, struktur kekuasaan dibentuk melalui interaksi dinamis di mana aktor secara terus-menerus merefleksikan posisi mereka,

memonitor tindakan mereka dan tindakan orang lain, dan beradaptasi terhadap perubahan konteks.

Refleksivitas dan adaptasi ini mencerminkan apa yang disebut Giddens sebagai "dialektika kontrol", di mana bahkan aktor dengan akses terbatas ke sumber daya kekuasaan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi tindakan aktor yang lebih kuat melalui penggunaan strategis sumber daya yang tersedia bagi mereka. Dalam konteks program CSR di Desa Juwiring, dialektika kontrol ini terlihat dalam berbagai strategi yang digunakan oleh aktor desa untuk menavigasi, menegosiasikan, dan terkadang menentang struktur kekuasaan yang terbentuk melalui program.

3.3. Negosiasi dan Strategi Survival Desa dalam Pusaran CSR

Sub-bab ini menganalisis dinamika negosiasi yang dilakukan oleh Desa Juwiring dalam menavigasi struktur kekuasaan yang kompleks yang terbentuk melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Tirta Investama. Analisis ini didasarkan pada pemahaman bahwa desa bukanlah penerima pasif dari program CSR, melainkan aktor aktif yang memiliki agensi untuk menegosiasikan kepentingannya dalam struktur kekuasaan yang asimetris. Pembahasan dalam sub-bab ini diorganisasikan ke dalam empat poin utama yang saling berkaitan untuk memahami strategi dan mekanisme negosiasi yang dikembangkan desa.

Eksplorasi mengenai Desa Juwiring membangun basis dukungan internal sebagai fondasi untuk melakukan negosiasi dengan aktor eksternal

terletak pada 3.3.1 Mobilisasi Dukungan Masyarakat. Analisis mencakup tiga mekanisme kunci: strategi membangun konsensus internal melalui musyawarah dan pelibatan institusi lokal; mekanisme legitimasi representasi yang menggabungkan prosedur formal dan pengakuan berbasis kapasitas; serta pengelolaan resistensi dan konflik internal melalui berbagai pendekatan adaptif.

Selanjutnya pendekatan yang dikembangkan desa dalam menghadapi jaringan aktor yang kompleks, termasuk PT Tirta Investama, Yayasan Gita Pertiwi, BAPPERIDA, dan Dispermasdes akan dibahas pada 3.3.2 Strategi Negosiasi Multipihak. Pembahasan meliputi taktik dan pendekatan negosiasi dengan PT Tirta Investama sebagai korporasi utama; pembentukan aliansi strategis dengan Yayasan Gita Pertiwi sebagai LSM pendamping; serta positioning desa dalam hubungan dengan institusi pemerintah daerah. Analisis ini mengungkapkan bagaimana desa mengembangkan strategi negosiasi yang bersifat adaptif dan kontekstual untuk menavigasi kepentingan yang beragam dan sering kali bertentangan.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sebagai modal negosiasi untuk memperkuat posisi tawarnya dalam struktur kekuasaan yang asimetris dibahas pada 3.3.3 Negosiasi Berbasis Sumber Daya. Analisis mencakup pengelolaan air dan pertanian sebagai basis negosiasi utama; transformasi pengetahuan lokal menjadi kekuatan negosiasi melalui adopsi dan adaptasi praktik baru; serta pemanfaatan jaringan sosial internal dan eksternal sebagai sumber daya strategis. Pembahasan ini

mendemonstrasikan bagaimana sumber daya lokal dapat ditransformasi menjadi instrumen politik dalam menghadapi kekuatan korporasi.

Terakhir terkait upaya desa untuk secara aktif membentuk program CSR agar selaras dengan aspirasi dan kebutuhan lokalnya dibahas pada 3.3.4. Artikulasi Kepentingan Lokal. Pembahasan meliputi integrasi agenda pembangunan desa dalam program pertanian berkelanjutan; negosiasi distribusi manfaat untuk mencegah ketimpangan dan eksklusi; serta transformasi program CSR menjadi aset pembangunan jangka panjang melalui pelembagaan praktik dan pengetahuan baru. Analisis ini menunjukkan bagaimana desa berupaya mengubah program CSR dari intervensi temporer menjadi perubahan sistemik yang berakar dalam kehidupan masyarakat.

Keempat sub-bab ini secara kolektif menggambarkan bahwa negosiasi desa dalam struktur kekuasaan CSR merupakan proses yang dinamis, multidimensional, dan penuh dengan tantangan. Melalui kombinasi mobilisasi dukungan internal, strategi multipihak, pemanfaatan sumber daya, dan artikulasi kepentingan lokal, Desa Juwiring menunjukkan kapasitas agensi yang signifikan dalam menghadapi asimetri kekuasaan dengan aktor korporasi dan pemerintah. Analisis ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih nuansif tentang dinamika negosiasi dalam konteks CSR

3.3.1. Politik Konsensus: Antara Partisipasi Genuine dan Mobilisasi Semu

Mobilisasi dukungan masyarakat menjadi komponen fundamental bagi desa dalam melakukan negosiasi di tengah struktur kekuasaan yang tercipta melalui program CSR. Merujuk pada teori strukturasi Giddens (2004), mobilisasi dukungan masyarakat merepresentasikan bagaimana agen (dalam hal ini desa) tidak hanya dikondisikan oleh struktur, tetapi juga dapat secara aktif membentuk struktur melalui tindakan kolektif. Di Desa Juwiring, mobilisasi dukungan masyarakat termanifestasi dalam tiga mekanisme utama: pembangunan konsensus internal, legitimasi representasi, dan pengelolaan resistensi.

a. Strategi Membangun Konsensus Internal

Strategi membangun konsensus internal merupakan langkah awal dan fundamental dalam proses negosiasi desa. Desa Juwiring menerapkan beberapa strategi untuk membangun konsensus internal terhadap program CSR, yang membentuk basis dukungan kolektif dalam menghadapi struktur kekuasaan eksternal. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Juwiring:

"Keputusan yang akan dikerjakan datangnya dari musyawarah terlebih dahulu... Dari pihak mereka itu bertanya apa yang dibutuhkan desa ini? Hambatan desa apa? Hambatan ini dari CSR saya bantu, saya laporkan ke Aqua nanti saya carikan dana saya buatkan proposalnya." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memposisikan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam membangun konsensus internal. Musyawarah ini tidak hanya

menjadi forum untuk memperoleh legitimasi keputusan, tetapi juga mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan desa secara kolektif. Hal ini sejalan dengan konsep "*communicative action*" (Habermas, 1984) yang menekankan pentingnya dialog dan partisipasi dalam membangun kesepahaman bersama.

Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan institusi-institusi lokal seperti kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam proses pembangunan konsensus. Ketua Kelompok Tani menjelaskan:

"Kalau untuk pengambilan keputusan, biasanya kita musyawarah dulu di pertemuan *selapanan* itu. Misalnya mau ada program dari Gita Pertiwi, kita bahas dulu bareng-bareng... Saya nggak mutusin sendiri, kita bareng-bareng, karena biar semua ngerasa memiliki program." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa konsensus dibangun tidak hanya pada level pemerintah desa, tetapi juga pada level kelompok masyarakat. Pendekatan ini menciptakan rasa kepemilikan bersama (*collective ownership*) terhadap program CSR yang menjadi modal sosial penting dalam negosiasi desa (Woolcock & Narayan, 2000).

Namun demikian, proses membangun konsensus internal ini tidak selalu inklusif dan masih menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu warga yang tidak terlibat langsung dalam program:

"Nah iki sing menurutku kurang transparan Mas. Wong mesthi sing dipilih yo kuwi-kuwi wae. Sing wis cedak karo perangkat desa, sing wis aktif nang kelompok. Lha wong-wong cilik sing ora aktif organisasi yo ora tau dijak." (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025)

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya membangun konsensus internal, masih terdapat kesenjangan dalam hal inklusivitas dan representasi. Cornwall (2008) menyebut fenomena ini sebagai *"invited spaces"* versus *"popular spaces"*, di mana ruang partisipasi formal yang diciptakan oleh elite sering kali gagal melibatkan kelompok-kelompok marjinal. Kesenjangan ini berpotensi melemahkan kohesi sosial dan pada gilirannya mengurangi efektivitas negosiasi desa terhadap aktor eksternal.

b. Mekanisme Legitimasi Representasi

Legitimasi representasi menjadi aspek krusial dalam mobilisasi dukungan masyarakat. Desa Juwiring mengembangkan beberapa mekanisme legitimasi representasi dalam konteks program CSR. Mekanisme formal utama adalah penunjukan perwakilan resmi dari desa, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa:

"Biasanya setiap tahun itu ada pertemuan kelompok rutin, ya rutin karena kami dibiayai desa. Selain itu alat-alat itu saya dibiayai desa. Terus saya pertemuan rutin setiap pertemuan kalau ada program saya, misalnya pembuatan pestisida nabati pupuk POC itu kami buat sama-sama nanti digunakan bersama-sama." (Jarwadi, Sekretaris Desa, wawancara, 21 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan dukungan formal dan material untuk kelompok-

kelompok masyarakat yang menjadi representasi desa dalam program CSR. Hal ini sejalan dengan konsep "*institutional bricolage*" (Cleaver, 2012) yang menjelaskan bagaimana masyarakat mengkombinasikan institusi formal dan informal untuk memperkuat posisi negosiasi mereka.

Di sisi lain, terdapat juga mekanisme legitimasi berbasis ketokohan dan kapasitas individu. Cerita tentang pemilihan Ketua KWT mengindikasikan mekanisme ini:

"Terus pada waktu itu rapat pemilihan-pemilihan yang ditunjuk Bu Sari itu di toko agro itu. Bu Sari katanya aku nggak bisa, soalnya di tugas di Jogja. Terus saya yang ditunjuk... akhirnya saya terima." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Penunjukan ini mencerminkan mekanisme legitimasi yang tidak selalu mengikuti prosedur formal, melainkan berbasis pada pengakuan kapasitas dan ketokohan individu dalam komunitas. Sebagaimana dijelaskan oleh G. Banks et al. (2016), kapasitas kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam efektivitas negosiasi komunitas dengan korporasi.

Namun, Gita Pertiwi sebagai pendamping program CSR juga memiliki peran signifikan dalam proses legitimasi representasi ini. Sebagaimana diungkapkan:

"Di wilayah hilir yang dilakukan oleh project itu menciptakan local hero yang menjadi community organizer lokal atau fasilitator lokal nantinya. Jadi kalau project selesai, kita exit mereka akan meneruskan itulah muncul salah satunya bu Sugiarti." (Rama, Manajer CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan adanya intervensi eksternal dalam pembentukan kepemimpinan lokal. Li (2007) mengkritisi praktik semacam ini sebagai bentuk "*rendering technical*" di mana korporasi dan NGO pendamping mengalihkan persoalan politik menjadi persoalan teknis melalui penciptaan '*local hero*' yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan program. Praktik ini berpotensi menggeser legitimasi kepemimpinan dari basis komunal menjadi basis teknis-administratif.

c. Pengelolaan Resistensi dan Konflik Internal

Pengelolaan resistensi dan konflik internal merupakan dimensi ketiga dalam mobilisasi dukungan masyarakat. Dalam konteks program CSR di Desa Juwiring, terdapat beberapa bentuk resistensi dan konflik internal yang memerlukan penanganan khusus untuk mempertahankan kohesi sosial dan dukungan kolektif.

Salah satu bentuk resistensi adalah skeptisisme terhadap program CSR, sebagaimana diungkapkan oleh pendamping dari Gita Pertiwi:

"Kalau itu pasti ada tantangan tersendiri, kalau kami meyakinkan semua warga kami itu dengan menciptakan petani *champion* tadi jadi ketika ada misalkan kami membahas tentang pembuatan pupuk dan sebagainya itu yang mengisi dari petani atau kami membuat testimoni dari petani itu yang sudah melakukan seperti itu sampai akhirnya mereka jadi bercerita itu bukan dari kami tetapi dari petani yang sudah menerapkan itu." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penanganan resistensi dilakukan melalui strategi penggunaan "*champion*" sebagai agen perubahan yang memiliki legitimasi sosial dalam komunitas. Strategi ini sejalan dengan apa yang disebut Filer & Jenkins (2017) sebagai "*strategic engagement*", di mana komunitas lokal mengembangkan kapasitas untuk menegosiasikan posisi mereka melalui representasi yang kredibel.

Bentuk resistensi lain adalah ketidakpercayaan terhadap motif perusahaan dalam menjalankan program CSR, sebagaimana diungkapkan oleh Modin Desa Juwiring:

"Tantangannya ya itu tadi, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa program CSR ini adalah bentuk kepedulian perusahaan, bukan untuk "membeli" sesuatu atau ada kepentingan tersembunyi. Kadang ada anggapan di masyarakat, "oh ini pasti karena PT Tirta Investama mengambil air kita, makanya mereka kasih program ini sebagai ganti rugi."" (Iqbal, Modin, wawancara, 24 April 2025)

Untuk mengatasi resistensi semacam ini, tokoh-tokoh masyarakat seperti Modin memanfaatkan forum-forum keagamaan untuk membangun narasi yang menghubungkan program CSR dengan nilai-nilai keagamaan:

"Sebagai modin, saya tidak langsung terlibat dalam programnya, tapi saya sering menggunakan forum pengajian atau ceramah untuk menyisipkan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bertani dengan cara yang baik." (Iqbal, Modin, wawancara, 24 April 2025)

Strategi ini mencerminkan apa yang disebut Merry (2006) sebagai "*vernacularization*" atau penerjemahan program dan ide-

ide eksternal ke dalam bahasa dan kerangka nilai lokal untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.

Selain itu, terdapat juga konflik kepentingan antarkelompok dalam masyarakat, khususnya terkait distribusi manfaat program:

"Yang namanya manusia banyak ya, Mas. Ada yang ogah-ogahan, ada yang semangat. Tapi Alhamdulillah yang semangat, misalnya ada program begini, dia laksanakan ada kita buat ini, kita laksanakan." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Untuk mengatasi konflik semacam ini, desa mengembangkan strategi diversifikasi program dan rotasi manfaat:

"Kemarin yang kena aliran dari DAM itu kan hampir 6 atau 7 desa biasanya gantian. Yang pertama kemarin Juwiring mungkin tahun selanjutnya pindah ke Bulurejo." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Strategi rotasi manfaat ini sejalan dengan prinsip *"equality of agency"* (Rao & Walton, 2004) yang menekankan pentingnya distribusi kesempatan yang lebih merata untuk membangun kohesi sosial dan dukungan kolektif terhadap program.

d. Tabel Mobilisasi Dukungan Masyarakat dalam Proses Negosiasi

Untuk memvisualisasikan dinamika mobilisasi dukungan masyarakat dalam proses negosiasi desa, berikut disajikan tabel yang menggambarkan strategi mobilisasi, mekanisme yang digunakan, serta tantangan dan hasil yang dicapai:

Tabel 3.3.1. Mobilisasi Dukungan Masyarakat dalam Proses Negosiasi

Strategi Mobilisasi	Mekanisme	Tantangan	Hasil yang Dicapai
Membangun Konsensus Internal	- Musyawarah desa - Pertemuan kelompok tani/KWT - Komunikasi formal dan informal	- Keterbatasan partisipasi - Eksklusi kelompok marjinal - Dominasi elite desa	- Identifikasi kebutuhan kolektif - Rasa kepemilikan program - Basis dukungan untuk negosiasi
Legitimasi Representasi	- Penunjukan formal - Pengakuan kapasitas individu - Penciptaan 'local hero'	- Intervensi pihak eksternal - Pergeseran basis legitimasi - Ketimpangan representasi	- Kepemimpinan berbasis kapasitas - Kontinuitas program - Representasi di forum multipihak
Pengelolaan Resistensi	- Penggunaan 'champion' - Integrasi nilai keagamaan - Diversifikasi dan rotasi manfaat	- Skeptisisme motif CSR - Kecemburuan sosial - Konflik distribusi manfaat	- Penerimaan program yang lebih luas - Pengurangan konflik internal - Kohesi sosial yang lebih kuat

Sumber: diolah oleh peneliti.

Tabel di atas menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan masyarakat dalam proses negosiasi desa melibatkan interaksi kompleks antara strategi, mekanisme, tantangan, dan hasil. Proses ini tidak linear, melainkan iteratif dan adaptif sesuai dengan konteks dan dinamika kekuasaan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Giddens (2004), agensi manusia dalam struktur kekuasaan tidak sepenuhnya dibatasi oleh struktur, melainkan juga memiliki kapasitas untuk memodifikasi dan mentransformasi struktur melalui praktik sosial yang reflektif.

3.3.2. Navigasi Desa dalam Labirin Kepentingan

Dalam struktur kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR, desa tidak berhadapan dengan satu pihak tunggal, melainkan dengan

jaringan aktor yang kompleks, termasuk perusahaan (PT Tirta Investama), LSM pendamping (Gita Pertiwi), dan berbagai institusi pemerintah (BAPPERIDA, Dispermasdes). Menghadapi kompleksitas ini, desa mengembangkan strategi negosiasi multipihak yang bersifat adaptif dan kontekstual. Mengacu pada teori negosiasi yang dikembangkan oleh Filer & Jenkins (2017), negosiasi multipihak memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan negosiasi bilateral, karena melibatkan navigasi melalui berbagai kepentingan dan relasi kekuasaan.

a. Taktik dan Pendekatan Negosiasi dengan PT Tirta Investama

Desa Juwiring mengembangkan berbagai taktik dan pendekatan negosiasi dalam menghadapi PT Tirta Investama sebagai pihak korporasi. Salah satu taktik utama adalah artikulasi kebutuhan dan permasalahan desa sebagai basis negosiasi, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa:

"Dari pihak mereka itu minta sing dibutuhne desa iki apa? Desa hambatane apa? Hambatane iki ya dari CSR tak bantu, tak laporke ning aqua nanti tak carikake dana tak gawekne proposale." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Pernyataan di atas menunjukkan pendekatan negosiasi berbasis kebutuhan (*needs-based negotiation*), di mana desa mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan jelas, kemudian menggunakan hal tersebut sebagai basis negosiasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "*interest-based negotiation*" yang dikembangkan oleh Fisher & Ury (2011), di mana fokus

negosiasi bukan pada posisi yang kaku, melainkan pada kepentingan mendasar yang dapat diidentifikasi dan diakomodasi.

Desa juga mengembangkan taktik "*leverage*" dengan memanfaatkan relasi dengan berbagai pihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa:

"Kalau dukungan, ya Alhamdulillah karena di Desa Juwiring kan ada kegiatan yang dari dana desa itu kan untuk pemberdayaan dan di situ ada di pertanian otomatis untuk pendanaan memang wajib, jadi ada. Juga ada untuk koordinasi lainnya yang berkaitan dengan Gita Pertiwi kan kelompok tani itu punya *link* dan dari desa sedikit banyak ada fasilitas" (Jarwadi, Sekretaris Desa, wawancara, 21 April 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana desa memanfaatkan berbagai sumber daya, termasuk dana desa dan jaringan kelompok tani, untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan perusahaan. Taktik ini sejalan dengan konsep "*resource leverage*" dalam teori negosiasi Filer & Jenkins (2017), di mana pihak dengan sumber daya terbatas dapat memperkuat posisi mereka dengan menggabungkan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia.

Taktik lain yang dikembangkan adalah penggunaan forum-forum formal sebagai arena negosiasi, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Perekonomian BAPPERIDA:

"Forum CSR yang diselenggarakan oleh BAPPERIDA dihadiri oleh perwakilan perusahaan dan tokoh desa, sehingga program CSR dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan desa dan prioritas kabupaten." (Sutrisno, BAPPERIDA, wawancara, 16 April 2025)

Forum-forum formal ini menjadi "arena negosiasi" di mana desa dapat menyampaikan aspirasinya dalam konteks yang lebih luas, dengan dukungan institusional dari pemerintah kabupaten. Hal ini sejalan dengan konsep "*institutional design*" (Agrawal & Gibson, 1999) yang menekankan pentingnya desain kelembagaan yang memungkinkan negosiasi yang lebih setara antara aktor dengan kekuasaan asimetris.

Selain itu, desa juga mengembangkan taktik eskalasi dan deeskalasi sebagai bagian dari strategi negosiasi. Hal ini terlihat dari pendekatan yang diambil ketika menghadapi masalah air:

"Sebenarnya kemarin, di tahun kemarin itu sempat mau diberikan itu, seperti pintu air itu hanya karena kami juga posisinya kami juga sedang sibuk pembangunan dari desa juga sedangkan di sana juga butuh seperti pelaporan-pelaporan. Akhirnya kami yang utamakan yang di dalam desa dulu jadi yang pintu airnya kami *cancel* dulu dari, padahal juga dapat bantuan dari sana." (Sakti, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, wawancara, 21 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa desa mampu melakukan prioritisasi dan penundaan program sebagai bagian dari strategi negosiasi jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan apa yang disebut Filer & Jenkins (2017) sebagai "*strategic patience*", di mana komunitas secara sadar menunda beberapa tuntutan untuk membangun hubungan kepercayaan dan mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar.

Namun demikian, taktik dan pendekatan negosiasi desa dengan PT Tirta Investama tidak selalu langsung, melainkan dimediasi oleh Gita Pertiwi sebagai LSM pendamping:

"Pola hubungannya itu sebetulnya tidak langsung, ya. Jadi modelnya itu seperti segitiga: ada PT. Tirta Investama, ada Gita Pertiwi sebagai LSM pendamping, dan ada pemerintah desa." (Jarwadi, Sekretaris Desa, wawancara, 21 April 2025)

Mediasi ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam negosiasi, di mana desa harus menegosiasikan kepentingannya tidak hanya dengan korporasi tetapi juga dengan LSM pendamping. Hal ini sejalan dengan temuan Bebbington et al. (2018) bahwa kehadiran LSM sebagai mediator dapat memperkuat atau justru memperlemah posisi tawar komunitas, tergantung pada bagaimana LSM tersebut memposisikan diri dalam struktur kekuasaan.

b. Aliansi Strategis dengan Yayasan Gita Pertiwi

Aliansi strategis dengan Yayasan Gita Pertiwi menjadi elemen penting dalam strategi negosiasi multipihak yang dikembangkan Desa Juwiring. Aliansi ini memungkinkan desa untuk mengakses sumber daya dan pengetahuan yang memperkuat posisi negosiasi mereka.

Salah satu bentuk aliansi adalah kolaborasi dalam implementasi program, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Kelompok Tani:

"Alhamdulillah pada waktu itu Gita Pertiwi masuk sini, kita kan kena serangan hama wereng, Mas. Kebetulan terus kita pertiwi mendatangkan pakarnya tapi dengan bahan-bahan di sekitar kita saja. Dan kita didemplotkan di Juwiring sini, di Ratan Tengah situ." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Kolaborasi ini memungkinkan desa untuk mengakses keahlian teknis yang memperkuat kapasitas produksi mereka, sesuai dengan konsep "*knowledge partnership*" (Pattberg & Widerberg, 2016) yang menekankan pentingnya kolaborasi berbasis pengetahuan dalam meningkatkan posisi tawar komunitas.

Bentuk aliansi lain adalah penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan:

"Kita biasanya ini dulu sih *assessment* dulu ya maksudnya kita akan melihat kebutuhan masing-masing wilayah itu kan. Nah setelah itu nantikan kita mengajukan di proposal ke Aqua kalau dari hasil pengamatan apa yang perlu kita kembangkan itu ini seperti ini ya gitu kan." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

Keterlibatan Gita Pertiwi dalam proses *assessment* kebutuhan dan pengembangan proposal menunjukkan peran strategis mereka sebagai penerjemah kepentingan desa ke dalam bahasa proyek yang lebih mudah diterima korporasi. Li (2007) menyebut proses ini sebagai "*translation*", di mana LSM menerjemahkan aspirasi lokal ke dalam kerangka program pembangunan yang dapat diterima oleh donor atau korporasi.

Selain itu, aliansi dengan Gita Pertiwi juga memungkinkan desa untuk menjangkau jaringan dan forum yang lebih luas: "Jadi saya sering ikut kumpulan di Polanharjo sana, Mas. Ya, ikut

kelompok tani sana juga saya ikut. Terus akhirnya itu dari kami pergi, ada begini, begini, begini.." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Akses terhadap jaringan dan forum yang lebih luas ini memperkuat kapasitas desa untuk belajar dari pengalaman desa lain dan mengadopsi praktik-praktik yang berhasil. Sesuai dengan "*network theory of power*" (Castells, 2011), akses terhadap jaringan menjadi sumber kekuasaan penting dalam era informasi.

Namun demikian, aliansi strategis dengan Gita Pertiwi juga menciptakan ketergantungan dan potensi pergeseran loyalitas, sebagaimana terindikasi dalam pernyataan: "Kalau komunikasi masih ada. Setiap saat masih ada komunikasi. Soalnya Kita Pertiwi kan awalnya masih pertama kali di Juwiring, Kelurahan Juwiring, Kecamatan Juwiring." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Komunikasi yang intensif antara Ketua KWT dengan Gita Pertiwi menciptakan jalur loyalitas baru yang berpotensi menggeser hubungan patronase tradisional berbasis desa. Hal ini sejalan dengan temuan Gaventa (2006) tentang bagaimana intervensi pihak eksternal dapat menciptakan "*new spaces of power*" yang mengubah dinamika kekuasaan lokal.

c. Positioning Desa dalam Hubungan dengan BAPPERIDA dan Dispermasdes

Positioning desa dalam hubungan dengan institusi pemerintah daerah seperti BAPPERIDA dan Dispermasdes menjadi aspek penting dalam strategi negosiasi multipihak. Desa Juwiring mengembangkan beberapa pendekatan *positioning* yang memperkuat posisi mereka dalam struktur kekuasaan.

Salah satu pendekatan adalah pemanfaatan BAPPERIDA sebagai fasilitator program CSR:

"Kalau kami lebih berperannya yang pertama karena kita instansi pemerintah tentunya sebagai regulator, artinya ada perda, perbup, sk tadi. Kemudian yang kedua mengkoordinasikan sumber daya, artinya karena fungsi BAPPERIDA mengkoordinasikan kami bisa mengkoordinasikan dengan dinas lain yang terlibat seperti DISPERNAKER, Dinas Kesehatan." (Sutrisno, BAPPERIDA, wawancara, 16 April 2025)

Desa memanfaatkan peran koordinatif BAPPERIDA untuk mengakses berbagai sumber daya dan program dari dinas-dinas terkait, memperkuat posisi tawar desa dalam negosiasi dengan korporasi. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Gaventa (2006) sebagai "*vertical integration*", di mana komunitas lokal membangun aliansi dengan aktor-aktor di level yang lebih tinggi untuk memperkuat posisi mereka.

Pendekatan lain adalah pemeliharaan keseimbangan antara otonomi desa dan dukungan institusional:

"Kalau untuk CSR, OPD sebagai koordinatornya memang ada di BAPPERIDA. Ada BAPPERIDA, jadi memang

sifatnya dari BAPERRIDA. Kami ya, sebenarnya tugas kami itu adalah pembinaan di tingkat desanya, tapi kalau kaitannya khusus dengan CSR-nya itu, kami memang sifatnya menunggu, tidak aktif ke desa supaya desa meminta itu kami tidak. Tapi kami menunggu kalau desa mau melakukan kerja sama, kerja sama dengan perusahaan tertentu, kami yang akan memfasilitasinya." (Adi Nugroho, Dispermasdes, wawancara, 16 April 2025)

Pendekatan ini mencerminkan strategi *positioning* desa sebagai aktor yang otonom namun tetap terhubung dengan institusi di level yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep "*networked governance*" (Rhodes, 2007) yang menekankan pentingnya hubungan non-hierarkis dan saling ketergantungan antara berbagai level pemerintahan.

Desa juga mengembangkan strategi *visibility* melalui keberhasilan program:

"Karena apa ya mereka jadi terbuka ya apa ternyata ini dikenal oleh sini-sini otomatis kan membawa nama desa, jadi kayak sering akhirnya ada kegiatan *wiwit* dan sebagainya undang camat dan sebagainya gitu sebagainya, undang camat dan sebagainya. Karena disitu sering jadi *ubinan*." (Titin, Gita Pertiwi, wawancara, 16 April 2025)

Keberhasilan program menjadi modal simbolik yang memperkuat posisi desa dalam struktur kekuasaan regional. Sesuai dengan konsep "*symbolic capital*" Bourdieu (1986), pengakuan dan reputasi menjadi sumber kekuasaan penting dalam negosiasi.

Namun demikian, *positioning* desa dalam hubungan dengan institusi pemerintah daerah juga menghadapi tantangan koordinasi dan sinkronisasi program:

"Di kabupaten Klaten kita melibatkan dunia usaha itu dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Tetapi fungsi kami sebagai advokat hanya memberikan arahan dan masukan supaya kegiatan yang dilakukan oleh CSR dari dunia usaha tepat sasaran, tepat guna, tepat mutu, dan sinkron dengan perencanaan pembangunan ataupun sinkron dengan cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah." (Sutrisno, BAPPERIDA, wawancara, 16 April 2025)

Sinkronisasi antara program CSR dengan prioritas pembangunan daerah menciptakan kompleksitas tersendiri dalam *positioning* desa, di mana desa harus menegosiasikan kepentingannya tidak hanya dengan korporasi tetapi juga dengan agenda pembangunan di level yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Li (2007) tentang bagaimana komunitas lokal harus bernavigasi di antara berbagai "*regimes of improvement*" yang sering kali tidak selaras dengan kepentingan lokal.

Secara keseluruhan, strategi negosiasi multipihak yang dikembangkan oleh Desa Juwiring mencerminkan upaya adaptif untuk menavigasi kompleksitas struktur kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR. Melalui kombinasi taktik negosiasi dengan PT Tirta Investama, aliansi strategis dengan Gita Pertiwi, dan *positioning* yang cermat dalam hubungan dengan institusi pemerintah daerah, desa berupaya memperkuat posisi tawarnya dalam menegosiasikan kepentingan lokal.

Namun demikian, strategi ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi ketergantungan pada aktor eksternal, pergeseran loyalitas, dan kesulitan dalam menyinkronkan kepentingan lokal dengan agenda pembangunan yang lebih luas. Keberhasilan strategi ini pada

akhirnya akan tergantung pada kemampuan desa untuk secara refleksif memantau dan menyesuaikan pendekatan mereka dalam merespons dinamika kekuasaan yang terus berevolusi.

3.3.3. Air dan Tanah Menjadi Senjata Daya Tawar

Dalam kondisi *asymmetric power relations* antara desa dan perusahaan, desa mengembangkan strategi negosiasi berbasis sumber daya sebagai cara untuk memperkuat posisi tawar mereka. Merujuk pada teori strukturasi Giddens (2004), sumber daya merupakan salah satu elemen kunci dalam strukturasi kekuasaan, di mana aktor yang mampu mengontrol dan memobilisasi sumber daya memiliki kapasitas untuk memengaruhi tindakan orang lain. Di Desa Juwiring, strategi negosiasi berbasis sumber daya terlihat dalam tiga bentuk utama: pengelolaan air dan pertanian, transformasi pengetahuan lokal, dan pemanfaatan jaringan sosial.

a. Pengelolaan Air dan Pertanian sebagai Basis Negosiasi

Pertanian dan sumber daya air merupakan modal utama yang dimiliki Desa Juwiring dalam menegosiasikan posisinya dalam struktur kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR. Kepala Desa Juwiring menjelaskan sentralitas isu air dalam negosiasi dengan PT Tirta Investama:

"Sebelum ada CSR, Gita Pertiwi kendala dari petani di Desa Juwiring masalah air. Kemarau biasanya petani ramai karena air itu, memang dari Desa Juwiring ada diatur masalah giliran air untuk pertanian... *Alhamdulillah* dalam tiga tahun ini ada CSR dari Gita Pertiwi melakukan kerja sama bersama dengan Desa Juwiring khususnya dengan

petaninya, ini masalahnya apa kok airnya susah... Akhirnya didata oleh pemerintah desa dan kelompok tani perwakilan dari desa dengan CSR Gita Pertiwi, setelah didata ternyata ada *talud* pintu air yang rusak dan beberapa tahun tidak diganti." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa desa memiliki kesadaran tentang signifikansi air sebagai sumber daya kunci yang dapat digunakan sebagai modal negosiasi. Dengan mengidentifikasi dan mengartikulasikan masalah irigasi sebagai isu utama, desa menciptakan ruang tawar yang substantif dalam interaksinya dengan perusahaan.

Perspektif ini diperkuat oleh pengalaman petani penerima manfaat program, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wati:

"Riyin kulo tumbas pupuk kimia setiap musim tanam, sakniki kulo sampun saged damel pupuk piyambak. Dados irit sanget, saged nyisihke arto kangge kebutuhan sanes." (Wati, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

Kemampuan petani untuk memproduksi pupuk organik sendiri tidak hanya meningkatkan otonomi mereka, tetapi juga memperkuat posisi tawar desa dalam negosiasi dengan korporasi. Dengan mengurangi ketergantungan pada input eksternal, desa dapat lebih percaya diri dalam mengartikulasikan kepentingannya.

Transformasi praktik pertanian ini sejalan dengan konsep "*dialectic of control*" dari Giddens (2004), di mana aktor yang tampak lebih lemah sebenarnya memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi aktor yang lebih kuat. Dalam

konteks Desa Juwiring, kendali atas sumber daya air dan kapasitas pertanian menjadi "senjata kaum lemah" (Filer & Jenkins, 2017) dalam negosiasi dengan korporasi.

b. Transformasi Pengetahuan Lokal Menjadi Kekuatan Negosiasi

Pengetahuan lokal tentang praktik pertanian dan pengelolaan air tidak hanya menjadi target program CSR, tetapi juga bertransformasi menjadi sumber daya negosiasi bagi desa.

Ketua Kelompok Tani menggambarkan proses ini:

"Inovasi yang banyak dirasakan ya itu tentang pupuk organik sama pestisida nabati. Sekarang petani banyak yang bisa bikin sendiri. Dulu kan pakai kimia semua, sekarang sudah campuran, bahkan ada yang sudah lepas kimia, pakai nabati semua." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

Kemampuan petani untuk mengadopsi dan mengadaptasi pengetahuan baru tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi mereka, tetapi juga memperkuat otonomi mereka vis-a-vis korporasi. Dengan menjadi "ahli" dalam praktik pertanian berkelanjutan, petani memperoleh legitimasi baru dalam negosiasi.

Transformasi ini mencerminkan konsep "*expert knowledge*" dari Li (2007) sebagai teknologi kekuasaan. Namun, alih-alih menjadi instrumen dominasi, pengetahuan ini justru menjadi sumber daya bagi desa untuk menegosiasikan kepentingannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa: "Dari kelompok tani sini kan desa-desa lain kepingin buat diajari." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Penyebaran pengetahuan dari desa ke desa lain tidak hanya memperkuat jaringan solidaritas antar desa, tetapi juga meningkatkan kapasitas kolektif mereka dalam menghadapi korporasi. Dalam kerangka Giddens (2004), ini dapat dipandang sebagai bentuk "*dialectic of control*" di mana pengetahuan digunakan sebagai sumber daya untuk mengubah relasi kuasa.

c. Pemanfaatan Jaringan Sosial sebagai Sumber Daya
Negosiasi

Jaringan sosial yang dimiliki desa, baik internal maupun eksternal, menjadi sumber daya penting dalam negosiasi dengan korporasi. Secara internal, kohesivitas kelompok tani dan KWT memperkuat kapasitas desa untuk memformulasikan dan mengartikulasikan kepentingannya. Ketua KWT menjelaskan:

"Setiap tanggal 10 itu kan pertemuan rutin. Nah disitu kita bahas bareng-bareng, misalnya mau ada kegiatan apa, mau tanam apa di kebun, mau masuk program apa. Kita rapatkan." (Sri Sugiarti, Ketua KWT, wawancara, 21 April 2025)

Forum-forum rutin ini tidak hanya menjadi ruang konsolidasi internal, tetapi juga memperkuat kapasitas desa untuk terlibat dalam negosiasi eksternal. Dengan membangun konsensus di tingkat akar rumput, desa memiliki mandat yang lebih kuat ketika berhadapan dengan korporasi.

Secara eksternal, desa juga memanfaatkan jaringan dengan LSM dan pemerintah daerah untuk memperkuat posisi negosiasi mereka. Kepala Bidang Perekonomian BAPPEDA menjelaskan:

"Forum CSR yang diselenggarakan oleh BAPPEDA dihadiri oleh perwakilan perusahaan dan tokoh desa, sehingga program CSR dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan desa dan prioritas kabupaten." (Sutrisno, BAPPEDA, wawancara, 16 April 2025)

Keterlibatan dalam forum multi-pihak ini memungkinkan desa untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam konteks yang lebih luas, dengan dukungan dari aktor-aktor kunci di tingkat kabupaten. Ini sejalan dengan konsep "*politics of scale*" (Haarstad & Fløysand, 2007) di mana aktor lokal terlibat dalam politik lintas skala untuk menegosiasikan kepentingan mereka.

d. Tabel Negosiasi Berbasis Sumber Daya dalam Strukturasi Kekuasaan

Untuk memvisualisasikan dinamika negosiasi berbasis sumber daya dalam strukturasi kekuasaan di Desa Juwiring, berikut disajikan tabel yang menggambarkan interaksi antara sumber daya, mekanisme negosiasi, dan implikasinya terhadap relasi kuasa:

Tabel 3.3.2. Negosiasi Berbasis Sumber Daya dalam Strukturasi Kekuasaan

Sumber Daya	Mekanisme Negosiasi	Implikasi bagi Relasi Kuasa
Air dan pertanian	Identifikasi dan artikulasi masalah	Memperkuat posisi tawar desa vis-a-vis korporasi
Pengetahuan lokal	Transformasi menjadi keahlian	Meningkatkan otonomi dan legitimasi desa dalam negosiasi
Jaringan sosial	Konsolidasi internal dan politik lintas skala	Membangun kekuatan kolektif dan dukungan eksternal

Sumber: diolah oleh peneliti.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki desa tidak sekadar menjadi objek program CSR, tetapi juga digunakan secara strategis sebagai instrumen negosiasi. Melalui serangkaian mekanisme seperti artikulasi masalah, transformasi pengetahuan, dan pemanfaatan jaringan, desa mampu memperkuat posisinya dalam struktur kekuasaan yang terbentuk melalui program CSR.

Analisis ini memperluas aplikasi teori strukturasi Giddens (2004) dalam konteks CSR, dengan menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan oleh aktor lokal untuk menegosiasikan kepentingan mereka dalam menghadapi kekuatan korporasi. Pada saat yang sama, temuan ini juga memperkaya pemahaman tentang "politik negosiasi" (Filer & Jenkins, 2017) dengan menunjukkan peran penting sumber daya dalam membentuk dinamika kekuasaan antara desa dan korporasi.

Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa negosiasi berbasis sumber daya ini tidak sepenuhnya mengatasi ketimpangan kekuasaan antara desa dan korporasi. Sebagaimana diungkapkan oleh pemilik warung yang tidak terlibat langsung dalam program, "setiap tahunnya ya menganggarkan untuk keaktifan daripada kelompok tani-kelompok tani. Kelompok tani tiap tahun ya dikei dana" (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa meski negosiasi berbasis sumber daya dapat memperkuat posisi desa.

Terlepas dari keterbatasan ini, analisis tentang negosiasi berbasis sumber daya memberikan pemahaman penting tentang agensi dan kapasitas adaptif masyarakat lokal dalam menghadapi intervensi CSR. Alih-alih menjadi penerima pasif, desa secara aktif menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk membentuk hasil program sesuai dengan kepentingan mereka. Pemahaman ini penting untuk pengembangan pendekatan CSR yang lebih responsif terhadap konteks dan aspirasi lokal.

3.3.4. Artikulasi Kepentingan Lokal dalam Program CSR

Artikulasi kepentingan lokal menjadi dimensi krusial dalam proses negosiasi desa menghadapi program CSR di Desa Juwiring. Dimensi ini mencakup upaya desa untuk mengintegrasikan agenda pembangunannya dalam program CSR, menegosiasikan distribusi manfaat, serta mentransformasi program CSR menjadi aset jangka panjang. Analisis terhadap dimensi ini mengungkapkan bagaimana desa secara aktif berupaya membentuk hasil program CSR agar selaras dengan aspirasi dan kebutuhan lokalnya.

a. Integrasi Agenda Desa dalam Program Pertanian Berkelanjutan

Pemerintah Desa Juwiring secara proaktif berupaya mengintegrasikan agenda pembangunan desanya ke dalam program CSR PT Tirta Investama, khususnya dalam aspek pertanian berkelanjutan. Kepala Desa menjelaskan:

"Akhirnya didata oleh pemerintah desa dan kelompok tani perwakilan dari desa dengan CSR Gita Pertiwi, setelah di data ternyata ada talud pintu air yang rusak dan beberapa tahun tidak di ganti." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Upaya pendataan infrastruktur irigasi yang rusak ini menjadi titik masuk bagi desa untuk mengartikulasikan kebutuhannya dan mengarahkan fokus program CSR. Dengan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan masalah spesifik ini, desa berhasil menjadikan perbaikan irigasi sebagai komponen integral dari program CSR.

Integrasi agenda desa juga terlihat dari peran aktif perangkat desa dalam implementasi program, sebagaimana dijelaskan oleh Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan:

"Biasanya tiap tahun itu ada pertemuan kelompok rutin, ya rutin karena kami di biayai desa. Selain itu alat-alat itu saya dibiayai desa." (Sakti, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, wawancara, 21 April 2025)

Keterlibatan dan kontribusi sumber daya desa dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa CSR tidak hanya dipandang sebagai intervensi eksternal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam perspektif Giddens (2004), ini dapat dilihat sebagai bentuk "strukturasi" di mana agen desa secara aktif terlibat dalam membentuk struktur yang mempengaruhi mereka.

b. Negosiasi Distribusi Manfaat Program

Pemerintah desa dan kelompok masyarakat di Juwiring juga terlibat aktif dalam menegosiasikan distribusi manfaat program CSR. Mereka berupaya memastikan bahwa manfaat tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau elemen masyarakat yang lebih luas. Kepala Desa menjelaskan pendekatan ini:

"Kemarin yang kena aliran dari DAM itu kan hampir 6 atau 7 desa biasanya gantian. Yang pertama kemarin Juwiring mungkin tahun selanjutnya pindah ke Bulurejo." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Mekanisme rotasi lokasi program antar desa ini menunjukkan upaya untuk mendistribusikan manfaat secara lebih merata. Melalui negosiasi semacam ini, desa berusaha mengatasi potensi ketimpangan atau kecemburuan yang dapat timbul dari alokasi manfaat yang tidak seimbang. Namun, proses negosiasi distribusi manfaat ini tidak selalu mulus. Sebagaimana diungkapkan oleh pemilik warung yang merasa tereksklusi, "*mesti sing dipilih yo kuwi-kuwi wae. Sing wis cedak karo perangkat desa*" (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya persepsi ketidakadilan dalam distribusi manfaat yang perlu ditangani oleh pemerintah desa.

Dalam perspektif teori akses (Ribot & Peluso, 2003), negosiasi distribusi manfaat ini dapat dipahami sebagai "politisasi akses" di mana berbagai aktor berupaya mempengaruhi dan

mengontrol alokasi sumber daya sesuai dengan kepentingan mereka. Keberhasilan desa dalam negosiasi ini akan menentukan sejauh mana program CSR bisa memberikan manfaat yang lebih inklusif.

c. Transformasi Program CSR Menjadi Aset Pembangunan Desa

Desa Juwiring tidak hanya berupaya mengintegrasikan agendanya dalam program CSR, tetapi juga berusaha mentransformasi program tersebut menjadi aset jangka panjang bagi pembangunan desa. Ketua Kelompok Tani menjelaskan visi ini:

"Kalo untuk keberlanjutan, ya kita sudah antisipasi dari awal. Jadi ilmu dari Gita Pertiwi kita dokumentasikan, kita praktekan terus. Misalnya cara bikin POC, pestisida nabati, itu semua udah jadi kebiasaan." (Edi, Ketua Kelompok Tani, wawancara, 23 April 2025)

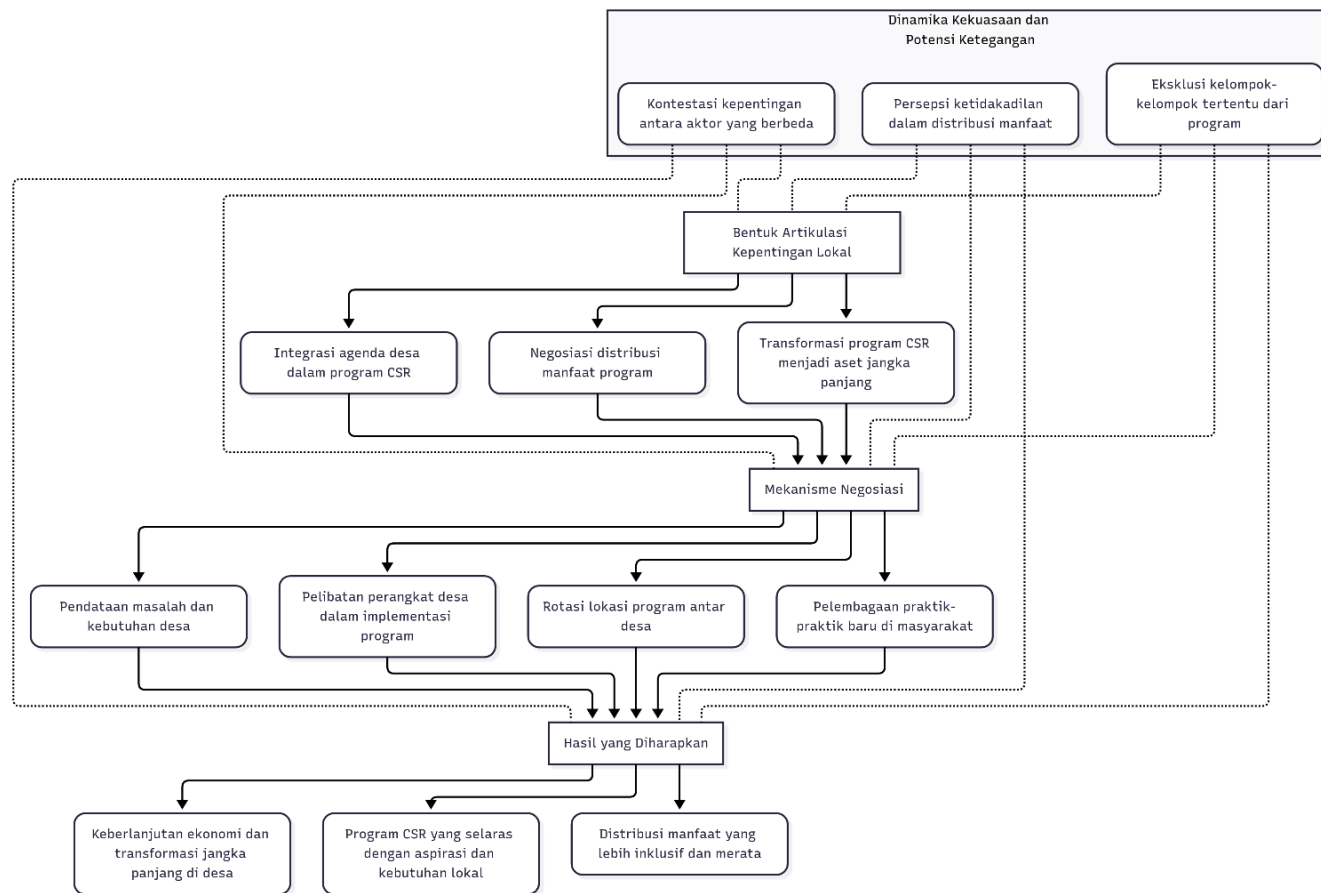
Adopsi dan pelebagaan praktik-praktik pertanian berkelanjutan ini menunjukkan bagaimana desa berupaya mentransformasi program CSR dari intervensi temporer menjadi perubahan sistemik yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan ekonomi pasca program, tetapi juga memperkuat kapasitas desa untuk terlibat dalam negosiasi dengan aktor eksternal di masa depan.

Upaya transformatif ini juga terlihat dari penyebaran pengetahuan dan praktik ke desa-desa lain. Seperti dijelaskan Kepala Desa, "sekarang sudah mulai ada yang jual padi organik,

harganya lebih bagus" (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025). Institusionalisasi dan penyebaran praktik-praktik baru ini mencerminkan apa yang disebut Giddens (2004) sebagai "strukturasi", di mana tindakan agen secara bertahap mengubah struktur yang ada.

d. Visualisasi Artikulasi Kepentingan Lokal dalam Negosiasi CSR

Bagan 3.3.1. Artikulasi Kepentingan Lokal dalam Negosiasi CSR



Sumber: diolah oleh peneliti.

Diagram di atas menunjukkan bahwa artikulasi kepentingan lokal dalam negosiasi CSR melibatkan serangkaian upaya strategis dari desa, mulai dari integrasi agenda dalam program, negosiasi distribusi manfaat, hingga transformasi program menjadi aset jangka panjang. Melalui berbagai mekanisme seperti pendataan masalah, pelibatan dalam implementasi, dan pelebagaan praktik baru, desa secara aktif berupaya mengarahkan program CSR agar selaras dengan aspirasi dan kebutuhan lokal.

Keberhasilan artikulasi kepentingan ini akan menentukan sejauh mana program CSR bisa memberikan manfaat yang inklusif, berkelanjutan, dan transformatif bagi desa. Namun, seperti ditunjukkan dalam diagram, proses ini juga diwarnai oleh dinamika kekuasaan dan potensi ketegangan, terutama terkait keadilan distribusi manfaat.

Analisis tentang artikulasi kepentingan lokal ini memberikan nuansa penting dalam memahami negosiasi CSR sebagai arena kontestasi kepentingan dan makna. Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa bukanlah penerima pasif, tetapi agensi aktif yang berupaya membentuk program sesuai dengan agenda dan aspirasinya. Pemahaman ini penting dalam mengembangkan pendekatan CSR yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks lokal.

3.4. Resistensi Tersembunyi Dan Ekonomi Politik Csr: Membongkar Topeng Pemberdayaan

Di balik kesuksesan naratif program CSR PT Tirta Investama, tersembunyi dinamika resistensi yang kompleks dan berlapis. Resistensi ini bukan gerakan frontal melawan korporasi, melainkan "senjata orang-orang kalah" (weapons of the weak) yang beroperasi di celah-celah struktur dominasi.

3.4.1. Ekonomi Politik Air: Pertarungan yang Dibungkam

Isu paling fundamental yang sengaja dibungkam dalam program CSR adalah kontestasi atas sumber daya air. Modin Desa Juwiring secara implisit mengungkapkan kesadaran kritis ini:

"Kadang ada anggapan di masyarakat, 'oh ini pasti karena PT Tirta Investama mengambil air kita, makanya mereka kasih program ini sebagai ganti rugi.'" (Iqbal, Modin, wawancara, 24 April 2025)

Pernyataan "ganti rugi" mengindikasikan pemahaman masyarakat bahwa ada sesuatu yang telah "diambil" - yakni air sebagai commons yang ditransformasi menjadi komoditas privat. Dalam ekonomi politik, CSR senilai ratusan juta rupiah menjadi "harga murah" untuk melegitimasi ekstraksi air yang nilai ekonominya mencapai miliaran rupiah per tahun.

Yang lebih ironis, program "konservasi air" justru mengalihkan tanggung jawab pengelolaan air kepada petani, sementara perusahaan terus mengekstraksi air untuk produksi komersial. Kepala Desa tanpa sadar mengonfirmasi ini:

"Sebelum ada CSR, Gita Pertiwi kendala dari petani di Desa Juwiring masalah air. Kemarau biasanya petani ramai karena air itu..." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Petani "ramai karena air" bukan sekadar masalah teknis irigasi, tetapi manifestasi dari krisis akses terhadap sumber daya yang semakin terbatas akibat ekstraksi industrial.

3.4.2. Anatomi Resistensi: Dari Penolakan Halus hingga Sabotase Tersembunyi

a. Non-Partisipasi sebagai Political Statement

Dewi, pemilik warung, mengartikulasikan resistensinya melalui penolakan berpartisipasi:

"Wah, sing jelas aku sibuk dodolan Mas. Warung iki bukak e seko jam 7 esuk tekan jam 6 sore. Dadine aku yo ora duwe waktu melu kumpulan-kumpulan ngono kuwi. Nek ditinggal, mosok warung ditutup, aku malah ora oleh duit." (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025)

Alasan "sibuk berdagang" adalah resistensi terselubung.

Dewi memilih ekonomi subsistennya sendiri ketimbang terjebak dalam jaring-jaring program yang dia yakini tidak akan menguntungkannya. Ini adalah bentuk "exit" dalam teori Hirschman - keluar dari sistem ketimbang menyuarakannya.

b. Kritik Terselubung dalam Bahasa Lokal

Penggunaan bahasa Jawa dalam kritik bukan sekadar preferensi linguistik, tetapi strategi resistensi:

"Nah iki sing menurutku kurang transparan Mas. Wong mesthi sing dipilih yo kuwi-kuwi wae. Sing wis cedak karo perangkat desa, sing wis aktif nang kelompok. Lha wong-wong cilik sing ora aktif organisasi yo ora tau dijak." (Dewi, Pemilik Warung, wawancara, 21 April 2025)

Frasa "kuwi-kuwi wae" (itu-itu saja) adalah kritik tajam terhadap oligarki desa yang menggunakan CSR untuk memperkuat dominasi. Bahasa Jawa menjadi "hidden transcript" - kritik yang aman karena tidak sepenuhnya dipahami oleh aktor eksternal.

c. Compliance Strategis dengan Agenda Tersembunyi

Bahkan mereka yang tampak patuh menyimpan agenda tersembunyi. Seorang petani mengungkapkan:

"Nek pas kumpulan nggih saged usul mas, tapi nggih biasane sing nemtokke niku penguruse. Kulo mboten masalah, selagi programipun sae lan manfaat." (Wati, Petani Penerima Manfaat, wawancara, 23 April 2025)

Pernyataan "mboten masalah" (tidak masalah) adalah strategi survival - tampak patuh di permukaan sambil memanfaatkan sumber daya program untuk kepentingan sendiri. Ini adalah "everyday politics" di mana subordinat menggunakan sumber daya dominan untuk tujuan mereka sendiri.

3.4.3. Fragmentasi Sosial sebagai Dampak Tersembunyi

CSR tidak hanya gagal mengatasi ketimpangan, tetapi justru menciptakan fragmentasi sosial baru:

a. Stratifikasi Baru: "Champion" vs "Ordinary"

Program menciptakan kategori "petani champion" yang mendapat privilese khusus:

"Di wilayah hilir yang dilakukan oleh project itu menciptakan local hero yang menjadi community organizer lokal atau fasilitator lokal nantinya." (Rama, Manajer CSR PT Tirta Investama, wawancara, 22 April 2025)

"Local hero" adalah eufemisme untuk kader yang dikooptasi. Mereka mendapat insentif material dan simbolik untuk menjadi perpanjangan tangan korporasi, menciptakan stratifikasi baru yang memecah solidaritas horizontal petani.

b. Politik Kecemburuan

Rotasi program antar desa yang diklaim sebagai "keadilan" justru menciptakan kompetisi:

"Kemarin yang kena aliran dari DAM itu kan hampir 6 atau 7 desa biasanya gantian. Yang pertama kemarin Juwiring mungkin tahun selanjutnya pindah ke Bulurejo." (Sugiarta, Kepala Desa, wawancara, 15 April 2025)

Sistem rotasi ini menciptakan "divide and rule" - desa-desa berkompetisi untuk mendapat giliran ketimbang bersatu menuntut hak struktural atas air.